Laporan Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Laporan Kajian

INDEKS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

TAHUN 2022

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (Puslitdatin)

Badan Narkotika Nasional

AGUSTUS, 2022

LAPORAN INDEKS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA TAHUN 2022

TIM KELOMPOK KERJA:

Pengarah	: Dr. Petrus R. Golose
Penanggung Jawab	: Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., Ph.D.
Konsultan Ahli	: Prof. Budi Utomo, Ph.D.
Narasumber	: Purwa Kurnia Sucahya, S.K.M., M.K.M.
Tim Peneliti	: Agus Dwi Setiawan, S.KM, M.Kes
	Hendri Hartati, S.KM., M.PH.
	Luluk Ishardini, S.KM., M.PH
	Mona Lisa, S.KM, M.KM
Ketua	: Dwi Sulistyorini, S.Si., M.Si.
Anggota	: Siti Nurlela Marliani, S.P., S.H., M.Si.
	Aris Sujarwati, S.H. M.Si.
	Tri Tjahyono, S.Sos., M.Si.
	Wildah Djamaludin, M.Si.
	Guno Wicaksono, S.H., M.H.
	Jarot Apriyanto
	Sri Lestari, S.Kom., M.Si.
	Sri Haryanti, S.Sos., M.Si.
	Novita Sari, S.Sos., M.H.
	Erma Antasari, S.Si.
	Armita Eki Indahsari, S.Si.
	Radityo Kunto Harimurti, S.Stat.
	Quazar Noor Azhim, A.Md.
	Rizky Purnamasari, S.Psi.
	Chipta Adhitya Rahman, A.Md.

Ringkasan Eksekutif

Latar Belakang

Penanganan permasalahan narkoba dalam struktur perencanaan pembangunan nasional disebut dengan Program P4GN yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pertanggungjawaban kepada publik terkait kinerja program P4GN memerlukan adanya indikator. Selama ini hanya diukur dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang memberikan gambaran dampak (impact) program P4GN yang baru dapat terukur dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Padahal pengukuran keberhasilan program atau kebijakan bukan hanya membutuhkan indikator yang bersifat jangka panjang, tetapi juga membutuhkan indikator yang dapat diukur perubahannya setiap tahun dan dilakukan secara rutin. Untuk itu, BNN perlu membangun alternatif pengukuran keberhasilan P4GN. Pengukuran ini menggunakan instrumen pengukuran kinerja program P4GN berdasarkan landasan teori dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga dapat memotret, meninjau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program P4GN secara tepat.

Alternatif pengukuran yang telah dilakukan di tahun 2020 adalah pengukuran Indeks P4GN. Saat tahun 2020, pelaksanaan penyusunan indeks P4GN ini digagas oleh Badan Narkotika Nasional yang merupakan leading sector dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Dalam kegiatan ini BNN bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). Kajian di tahun 2020 menghasilkan angka indeks P4GN nasional yaitu 53,14 persen artinya masuk ke dalam kategori cukup efektif. Sementara itu, hasil indeks P4GN di tingkat provinsi menghasilkan 55,9%.

Pada tahun 2022 ini dilakukan penghitungan kembali angka indeks P4GN. Atas dasar itu laporan ini dibuat dengan menggunakan data dasar dari SIN (Sistim Informasi Narkoba) milik BNN dan survei online kepada seluruh institusi yang ada di BNN, baik pusat, provinsi, dan kab/kota. Tentunya, kajian yang

dilakukan lebih baik pendekatannya dan juga modifikasi metode perhitungan dari metode sebelumnya. Tujuannya agar hasilnya lebih merefleksikan kondisi hasil capaian kerja program P4GN dari tiap tingkatan, yaitu nasional, provinsi dan kab/kota.

Tujuan

Tujuan kajian penyusunan Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah:

1. Menyusun rumusan perhitungan indeks komposit P4GN dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan keseluruhan (input, proses, layanan/ouput) dan pendekatan kebijakan (soft approach, hard approach dan smart approach).
2. Mengetahui nilai indeks P4GN pada berbagai tingkatan, yaitu pusat, provinsi, dan kab/kota.

Kerangka Konsep

Metode

Kajian penyusunan indeks P4GN menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui pengisian data mandiri dengan format instrumen terstruktur. Instrumen tersebut diisi secara online dengan menggunakan google form. Pengisian angket survei ditujukan kepada seluruh tingkatan BNN, baik di tingkat pusat, BNN provinsi, dan BNN kab/kota. Instrumen survei disusun dengan mengacu dari hasil analisis data sekunder dari sistem informasi nasional (SIN) yang dimiliki oleh BNN.

Pendekatan kualitatif dilakukan melalui diskusi kelompok terpimpin (FGD) yang melibatkan BNN provinsi dan BNN kab/kota. Kegiatan ini dilakukan per tiap kedeputian yang dilaksanakan secara online selama 2 hari di bulan Juli 2022, sebanyak 5 kali FGD. Tim penyusun indeks P4GN merupakan tim yang berasal dari perwakilan tiap kedeputian yang ada di BNN dan peneliti. Tim secara rutin bertemu dan berdiskusi atas berbagai temuan lapangan dan mencari solusi bila ada hambatan.

Setelah data terkumpul, selanjutnya melakukan pengukuran dan pengolahan data. Cara penghitungan indeks P4GN sebagai berikut:

1. Menghitung bobot. Untuk menghitung bobot, digunakan jumlah populasi penduduk dari tiap kab/kota dan tiap provinsi dan diproporsikan dengan total jumlah penduduk. Hasilnya dilakukan invers, dengan cara membagi angka 1 (satu) dengan proporsi penduduk per kab/kota dikalikan 1000.
2. Mengalikan bobot (point 1) dengan jumlah kegiatan per tiap kegiatan menurut kategori input, proses, layanan/ouput pada tiap satker/kedeputian. Untuk indikator layanan dipilih dalam bentuk angka rasio atau proporsi, bukan angka absolut. Contoh angka proporsi adalah jumlah orang yang tes positip narkoba dibagi jumlah orang tes narkoba.
3. Hasil perhitungan dari point 2, selanjutnya dicari nilai rentang tertinggi (nilai maksimal) dari seluruh kab/kota atau provinsi yang akan digunakan sebagai denominator untuk pembagi hasil point 2, di tiap kab/kota/provinsi. Angka ini merupakan nilai asli hasil akhir sebelum dilakukan normalisasi.
4. Selanjutnya lakukan tindakan normalisasi. Tujuan normalisasi untuk menstandarkan angka dalam rentang nilainya antara 0 sampai 1. Rumus yang digunakan sebagai berikut: (nilai hasil - 0) / (nilai maksimal - 0).
5. Hasil perhitungan angka pada point 4. Selanjutnya dimasukkan dalam formula :

   Indeks P4GN = w_1 Indeks Input + w_2 Indeks Proses + w_3 Indeks Layanan

   W_1 = 20%; W_2 = 30%; W_3= 50%;

   w menunjukkan nilai bobot di tiap dimensi pengukuran yang disepakati oleh tim berdasarkan diskusi internal dan hasil FGD.
6. Setelah diperoleh angka dari hasil perhitungan formula pada point 5. Langkah selanjutnya melakukan skoring, dengan formula sebagai berikut:

   (Nilai point 5 * 50) + 40

7. Angka point 6 selanjutnya dibuat rata-rata ketika akan menghitung angka indeks P4GN pada tingkat kab/kota, provinsi, dan nasional. Angka Indeks P4GN pada tingkat provinsi merupakan gabungan rata-rata angka angka indeks P4GN di tingkat kab/kota dan provinsi. Sedangkan angka indeks P4GN nasional merupakan rata-rata gabungan nilai indeks di tingkat kab/kota, provinsi, dan BNN pusat.

   Sebagai catatan: Kami menyepakati memberikan nilai maksimal sebesar 90 per tiap indikator, dan nilai terendah adalah 40 per tiap indikator. Kesepakatan ini diputuskan setelah mempertimbangkan berbagai hal, terutama kualitas data yang masuk ke kami. Diduga karena ketidakjelasan dari petugas pengisi data di lapangan, yang mengakibatkan kegagalan paham yang menyebabkan ketidaksesuaian data maka diputuskan bagi daerah yang tidak ada isinya atau tidak sesuai datanya diberikan nilai minimal sebesar 40. Jadi tidak dianggap kosong sama sekali, karena faktanya mereka telah bekerja.

8. Hasil angka indeks P4GN selanjutnya, dilakukan klasifikasi atau pengkategorian untuk memudahkan dalam memantau perkembangan tiap kab/kota atau provinsi. Klasifikasi dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu sangat efektif (nilai indeks lebih dari 80), Efektif (nilai indeks 60-80), cukup efektif (nilai indeks 50-60) dan kurang efektif (nilai indeks kurang dari 50).

Software Microsoft Excel digunakan saat pengolahan dan analisis data, terutama fasilitas pivot table. Analisis data yang dilakukan berupa distribusi frekuensi dan tabulasi silang antar variabel. Analisis pendekatan indeks P4GN terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pendekatan keseluruhan (sistem) yang terdiri dari dimensi input, proses, layanan/ouput. Kedua pendekatan kebijakan yang terdiri dari dimensi hard, soft, smart, dan cooperation approach. Kami tidak melakukan uji statistik karena analisis yang dilakukan lebih kepada statistik deskriptif. Dengan tujuan memberikan gambaran dan distribusi hasil angka indeks P4GN di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota.

Untuk itu, kedua jenis angka indeks P4GN tersebut akan dilakukan tabulasi silang antar penyusun dimensi indeks, tingkatan (pusat, provinsi,

kab/kota), klasifikasi indeks (sangat efektif, efektif, cukup efektif, dan kurang efektif), kedeputian (berantas, pencegahan, rehabilitasi, dayamas, hukker), dan sebagainya.

Beberapa keterbatasan dari kajian ini yang mungkin akan mempengaruhi hasil dari kajian ini sebagai berikut:

1. Data dari sistem informasi nasional (BNN) masih banyak data yang diperlukan dalam renstra dan penyusunan indeks P4GN belum tersedia. Dari data yang ada, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah kelengkapan isian data dan isu kualitas data.
2. Hasil isian survei online ada beberapa daerah yang isinya tidak sesuai dengan pertanyaannya. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktahuan petugas pengisi data, atau petugas tidak memiliki datanya sehingga asal mengisi. Di sisi lain, jenis data yang diminta diisi cukup banyak dan harus membuka dokumen dengan rentang waktu yang lama, misalkan 2 tahun terakhir.
3. Isian data yang tertera dalam instrumen dianggap telah sesuai dan benar, kecuali ada data yang sangat janggal dilakukan konfirmasi. Bila tidak dimungkinkan, maka dilakukan tindakan dengan cara melakukan inputasi data tidak lebih dari 5% dari total data. Bila input data yang diberikan salah atau outlier ke atas, tentu akan berpengaruh atas hasil angka indeks karena digunakan nilai rentang (maksimal) di salah satu perhitungannya.
4. Hasil kajian ini tidak mencerminkan angka kinerja yang sesungguhnya dari program P4GN. Hasil kajian ini menunjukkan peringkat pencapaian program P4GN antar daerah (rangking), serta dimensi yang mempengaruhinya. Setidaknya, hasil ini memberikan gambaran dan cambuk bagi kita untuk memperbaiki kinerja program P4GN ke depannya agar mampu bersaing dengan daerah lainnya.

Hasil

Angka indeks P4GN diukur dengan 2 pendekatan, yaitu angka indeks P4GN keseluruhan yaitu dengan pendekatan sistem (input, proses, dan layanan/output). Kedua, dengan pendekatan kebijakan yang sedang

diimplementasikan oleh BNN yang dikenal dengan dimensi hard approach[1], soft approach[2], smart approach[3], dan cooperation approach [4].

Angka Indeks P4GN Keseluruhan (Nasional)

Penyusunan indeks P4GN telah dikembangkan sejak tahun 2020 dengan merujuk pada data 2019. Waktu itu, kegiatan ini pendekatan yang digunakan pendekatan supply dan demand. Namun, hasilnya dapat diperbandingkan dalam kajian ini karena bersifat nasional. Sebagai catatan, tim waktu itu tidak menghitung pada tingkat BNNK kab/kota, hanya provinsi dan nasional.

Angka indeks P4GN keseluruhan cenderung stabil dalam 3 tahun terakhir, di kisaran angka 53% sampai 55%. Hasil angka indeks dua tahun terakhir, kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan peningkatan kinerja tidak bisa optimal, tetapi BNN pusat dan BNN daerah masih mampu mempertahankan angka indeks P4GN.

Tantangan terberat implementasi program P4GN dimasa pandemi, tidak hanya anggaran tetapi adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB), lalu diubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini mengakibatkan masyarakat tidak bisa beraktivitas, sehingga kegiatan/ program tidak bisa dijalankan, karena adanya sanksi bila melanggar regulasi tersebut. Akibatnya, kegiatan lebih banyak dilakukan secara online (daring), sehingga hasil capaian tidak optimal terutama kegiatan/program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Bila dilihat dari dimensi sistem, ada keseimbangan strategi kegiatan yang dilakukan pada dimensi input, proses, dan layanan (output). Kontribusi dari tiap dimensi relatif sama banyak, di kisaran 51% sampai 54% dalam dua tahun

[1] mencakup seluruh kegiatan/program yang terkait dengan kedeputian pemberantasan dan rehabilitasi.
[2] mencakup seluruh kegiatan/program yang terkait dengan kedeputian pemberdayaan masyarakat dan pencegahan
[3] mencakup seluruh kegiatan/program yang terkait dengan kedeputian sestama dan pusat-pusat di lingkungan BNN
[4] mencakup seluruh kegiatan/program yang terkait dengan kedeputian hukum dan kerjasama

terakhir. Kondisi ini memicu terjadinya angka indeks P4GN yang stagnan antara tahun 2021 dan 2022.

Angka Indeks P4GN Pendekatan Kebijakan

Angka indeks pendekatan kebijakan mengindikasikan pendekatan yang paling berkontribusi untuk mengatasi persoalan P4GN. Secara nasional, temuan angka indeks ini lebih tinggi yaitu 58,7% (2021) dan 59.3 (2022), dibandingkan angka indeks keseluruhan. Namun, kenaikan angka tersebut sangat kecil atau dapat dikatakan stabil di kisaran 59% dalam 2 tahun terakhir. Ini mengindikasikan persoalan P4GN semakin berat, apalagi situasi Pandemi Covid-19 yang belum usai sampai saat ini. Sebagai catatan, angka indeks ini tidak dihitung dalam kegiatan kajian di tahun 2020.

Penelusuran angka per dimensi, memperlihatkan dimensi hard approach yang paling memberikan kontribusi terbesar, diikuti oleh smart approach. Kegiatan hard approach karena bersifat pemberantasan dan rehabilitasi sepertinya tidak terpengaruh oleh situasi pandemi, karena tidak memerlukan banyak orang untuk berkumpul. Demikian pula untuk smart approach lebih banyak kegiatan yang mendukung kelancaran semua program di lingkungan BNN. Namun, kegiatan yang terkait langsung ke masyarakat sepertinya terpengaruh, seperti pada soft approach.

Bila dipilah lebih lanjut, kontribusi terbesar dari pendekatan hard power berasal dari kedeputian berantas. Kedeputian berantas memiliki angka indeks terbesar (70% & 71%) dibandingkan kedeputian lainnya (kurang dari 55%).

Angka Indeks P4GN Keseluruhan di Tingkat Nasional

Angka indeks P4GN nasional dengan pendekatan keseluruhan maupun pendekatan kebijakan berada di antara angka indeks P4GN provinsi dan angka indeks P4GN kab/kota. Angka indeks provinsi cenderung lebih tinggi dibandingkan angka indeks di kab/kota pada kedua pendekatan. Pada indeks

P4GN keseluruhan tingkat provinsi cenderung stabil, di kisaran 56%, sementara indeks P4GN di kab/kota cenderung ada kenaikan sedikit, dari 51% ke 54%.

Hal ini mengindikasikan kinerja P4GN keseluruhan di tingkat BNN kab/kota lebih mampu mengatasi berbagai tantangan di tengah pandemi Covid-19. Hal ini mungkin karena BNN Kab/kota lebih implementor atau operasional sehingga lebih mengetahui kondisi di lapangan dalam mengimplementasikan dan mengatur strategi kegiatan/program. Dibandingkan BNN provinsi perannya lebih melakukan koordinasi dan pembinaan bagi BNNK.

Pola yang sama terlihat pula pada indeks P4GN dengan pendekatan kebijakan. Indeks P4GN pendekatan kebijakan di tingkat kab/kota lebih terlihat perubahan hasilnya di tahun 2022. Sementara di provinsi, relatif tidak banyak berubah angka indeks P4GN-nya dalam 2 tahun terakhir.

Angka Indeks P4GN Keseluruhan di Tingkat Provinsi

Angka indeks P4GN di tingkat provinsi dibangun dari angka indeks P4GN di tiap BNN provinsi dan tiap BNN kab/kota yang ada di provinsi tersebut. Angka ini merupakan angka rerata dari semua angka indeks yang dihasilkan di tiap BNNP dan BNNK.

Angka indeks P4GN keseluruhan di tingkat provinsi cenderung stabil dalam 2 tahun terakhir di kisaran 56%. Bila ditelusuri lebih mendalam dari dimensi penyusun indeksnya, terlihat proporsi antar dimensi tidak jauh berbeda antara input, proses, dan layanan/output, di kisaran 49% sampai 52%.

Angka indeks P4GN pendekatan kebijakan di tingkat provinsi sebesar 50.9% di tahun 2021 dan 60,2% di tahun 2022. Bila ditelaah lebih lanjut, kontribusi terbesar berasal dimensi hard approach. Sedangkan kontribusi terendah adalah soft approach. Hard approach memberikan kontribusi sekitar 60% di tahun 2021, lalu terus meningkat menjadi 65% tahun 2022. Ini mengindikasikan kegiatan hard approach semakin diperkuat di tingkat provinsi. Sementara pendekatan lainnya, relatif stagnan.

Penyusun dimensi hard approach adalah kedeputian berantas dan rehabilitasi. Proporsi kedeputian berantas yang paling tertinggi dibandingkan kedeputian lainnya. Posisi kedeputian Dayamas dan pencegahan berada diatas sedikit dari rehabilitasi di tahun 2021. Sementara kedeputian hukker berada di tengah. Hal ini menjelaskan, temuan yang terjadi pada indeks P4GN pendekatan kebijakan, dimana urutan indeksnya adalah hard, cooperation, dan soft power.

Di tingkat provinsi dan kab/kota tidak ada smart approach, karena kegiatan ini bersifat dukungan yang dilakukan oleh Sestama dan pusat-pusat yang ada di lingkungan BNN pusat. Secara praktek, mungkin ada di BNNP dan BNNK, tetapi kami tidak melakukan pengukuran secara khusus.

Angka indeks P4GN keseluruhan juga di rinci menurut provinsi. Ada provinsi yang angka indeks keseluruhannya turun, namun kebanyakan naik. Walaupun kenaikannya tidak besar. Angka indeks P4GN ini rentang antara nilai minimal dan maksimalnya tidak terlalu lebar (sekitar 8%). Ini mengindikasikan, tupoksi yang diterapkan antar provinsi tidak jauh berbeda. Sayangnya angka indeks P4GN yang dihasilkan masih jauh dari harapan kita semua.

Angka indeks tertinggi di provinsi Papua Barat, baik tahun 2021 dan 2022. Namun, angka indeks ini mungkin tidak bisa disandingkan dengan provinsi lainnya karena di Papua Barat tidak ada BNN kab/kota, sehingga angka indeks yang dihasilnya hanya menggambarkan angka tunggal BNN provinsi. Angka indeks P4GN yang dihasilkan di Papua Barat, terlihat cenderung menurun.

Di tahun 2022, angka indeks P4GN tertinggi di provinsi Jambi (59%). Sementara Indeks P4GN yang terendah ditemukan di provinsi Kalimantan Barat sekitar 51% (2022). Sementara indeks P4GN terendah di tahun 2021 adalah provinsi Lampung sekitar 49%. Detail angka indeks P4GN secara lengkap dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

Angka Indeks P4GN Keseluruhan di Tingkat Kabupaten/Kota

Angka indeks P4GN keseluruhan di kab/kota sekitar 51% di tahun 2021, lalu menjadi 54% tahun 2022. Apabila ditelusuri dimensi yang membangun indeks tersebut, ternyata angka capaiannya kurang dari 50% di tahun 2021 baik pada input, proses, dan layanan. Di tahun 2022 ada peningkatan sedikit pada semua dimensi, menjadi sekitar 50% sampai 51%. Dimensi input menjadi angka indeks kontributor terbesar dibandingkan dimensi lainnya.

Angka indeks P4GN pendekatan kebijakan lebih tinggi nilai indeksnya dibandingkan indeks P4GN keseluruhan. Angka indeks P4GN pendekatan kebijakan sekitar 54% (2021), lalu meningkat menjadi 58% (2022). Kontribusi terbesar karena adanya peningkatan angka indeks pada dimensi hard approach, yang capaiannya meningkat dari 59% di tahun 2021 menjadi 64% di tahun 2022. Kontribusi kedeputian berantas yang paling besar dibandingkan kedeputian lainnya.

Mengingat jumlah kab/kota cukup besar, 173 kab/kota, maka untuk memudahkan dalam pemantauan kinerja maka dibuat klasifikasi angka indeks dalam 4 kategori. Sebagian besar kab/kota masuk dalam klasifikasi cukup efektif, baik di tahun 2021 dan 2022. Klasifikasi kab/kota yang cukup efektif semakin meningkat, dari 67% menjadi 84%. Artinya, ada sekitar 17% dari kab/kota yang telah naik kelas ke tingkat yang lebih baik. Kenaikan kelas klasifikasi juga terlihat pada klasifikasi efektif, dimana ada kenaikan dari 2% menjadi 8%. Dengan demikian dapat disimpulkan, status klasifikasi kab/kota semakin banyak yang membaik atau meningkat dari tahun 2021 ke 2022.

Angka indeks P4GN keseluruhan di kab/kota terendah sebesar 44% (Kota Tidore Kepulauan), sedangkan yang tertinggi adalah Banjarmasin sebesar 64% dan hanya berbeda 0,1% dengan kab Morowali. Rentang indeks antara kab/kota terendah dan tertinggi sekitar 20% yang terdistribusi untuk 173 kab/kota, sehingga angka indeks antar satu kab/kota dengan kab/kota lainnya tidak jauh berbeda. Ini mengindikasikan setiap BNN kab/kota harus berupaya keras mempertahankan nilai indeks setiap tahunnya, sebab perbedaan sedikit nilai indeks akan bisa mempengaruhi peringkat antar kab/kota setiap tahunnya.

Tantangan dan Strategi Pencapaian Kinerja P4GN

Dari hasil FGD diketahui umumnya semua BNNP/ BNNK menyebutkan bahwa dalam 2 tahun terakhir capaian kinerja berbasis anggaran sudah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Dalam beberapa kegiatan terjadi pengembangan kegiatan melalui dana non DIPA, tetapi output kegiatan tidak dilaporkan dalam LKIP sebagai capaian kinerja. Pengembangan kegiatan non DIPA banyak dibiayai dari hasil kerjasama lintas sektor di berbagai daerah.

Tantangan

Tantangan pelaksanaan kegiatan dalam situasi pandemi covid 19 menyebabkan berbagai kegiatan tidak bisa dilaksankan secara maksimal terkait kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PSBB dan PPKM) dan refocusing anggaran. Peran daerah juga belum maksimal dalam mendukung kegiatan P4GN karena menganggap permasalahan narkoba tidak menjadi prioritas daerah tetapi menjadi tupoksi BNN.

Payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan lintas sektor di daerah adalah regulasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait, tetapi pada kenyataannya masih banyak daerah yang belum mempunyai regulasi yang dimaksud. Di sisi lain, belum semua kota/kabupaten terbentuk BNNK sehingga masih banyak permasalahan narkoba yang belum mendapat penanganan secara maksimal. Pada Sebagian besar BNNK yang sudah terbentuk pun masih banyak keterbatasan terkait SDM, sarana prasarana, anggaran, dan kesulitan akses geografis.

Pelaksanaan kegiatan oleh berbagai satker masih banyak terjadi kendala di berbagai wilayah, misalnya satker Dayamas dan pencegahan yang terkendala pelaksanaan kegiatan tes narkoba karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Kegiatan bimtek dan pelatihan kader/penggerak kegiatan P4GN juga tidak bisa dilakukan secara langsung (offline). Pada satker rehabilitasi juga masih banyak terkendala keterbatasan tenaga kesehatan (terutama dokter) di klinik atau fasyankes, banyak klien IPWL drop out dengan alasan jauhnya akses layanan ataupun karena stigma negatif sebagai pelaku kriminal. Pada satker

pemberantasan masih banyak kekurangan petugas penyidik, kurangnya anggaran penyidikan dan kegiatan intelijen dalam pengungkapan kasus. Kualitas petugas input data SIN saat ini juga belum terstandarisasi karena kurangnya pelatihan sehingga data yang dimasukan seringkali tidak sesuai ataupun ada beberapa kegiatan pada masing-masing satker yang tidak bisa diinput ke dalam SIN karena form isian jenis kegiatan (template SIN) tidak tersedia.

Strategi

Keterbatasan anggaran karena refocusing dalam penanganan covid-19 disiasiati dengan melakukan integrasi kegiatan P4GN ke dalam kegiatan lainnya. Metode online (daring) menjadi strategi efektif pelaksanaan kegiatan di masa pandemik covid 19. Sinergitas kegiatan P4GN kolaborasi dengan OPD dan lintas sektor juga banyak dikembangkan untuk mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan. Selain itu, advokasi anggaran kepada pimpinan daerah terus ditingkatkan dengan mengacu pada MoU dan regulasi pemerintah daerah.

Dalam upaya deteksi dini dan penjaringan penyalahgunaan narkoba, BNNP/ BNNK bekerjasama dengan satpol PP untuk menjangkau komunitas anak jalanan. Sedangkan penjangkauan ke sekolah dengan melibatkan Puskesmas. Kerjasama dengan universitas terus ditingkatkan.

Untuk meningkatkan cakupan IPWL dengan kegiatan rehabilitasi melalui remaja desa dengan metode jemput bola, dukungan transportasi dari pemerintah daerah dan kapal milik TNI AL untuk menjangkau daerah kepulauan. Pemberian dana hibah oleh pemda juga terlihat untuk kegiatan pemberantasan dalam bentuk razia-razia yang tidak dialokasikan dari DIPA.

Pemanfaatan teknologi terlihat dalam layanan SKHPN menggunakan metode online untuk akses klinik pratama. Peran agen pemulihan (AP) dan kader penggerak kegiatan P4GN perlu dimaksimalkan sebagai strategi TOT kepada masyarakat melalui kegiatan intervensi berbasis masyarakat (IBM), termasuk peningkatan skill terapi vokasional kepada para klien IBM.

Kesimpulan

Angka indeks P4GN keseluruhan dalam 3 tahun terakhir terlihat tidak jauh berbeda, dikisaran 53% sampai 55%. Namun, bila menggunakan pendekatan angka indeks P4GN dimensi kebijakan hasilnya lebih tinggi dikisaran 59% atau cukup efektif.

Angka indeks P4GN pendekatan kebijakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota cenderung tidak banyak mengalami perubahan atau stagnan pada dua tahun terakhir (2021 & 2022). Di tingkat nasional di kisaran 59%, provinsi 60%, dan kab/kota ada peningkatan sedikit dari 56% menjadi 58%. Ini mengindikasikan bahwa kinerja P4GN keseluruhan di tingkat BNN kab/kota lebih mampu mengatasi berbagai tantangan di tengah pandemi Covid-19, karena BNN Kab/kota sebagai implementor program sehingga lebih mengetahui kondisi dan mengatur strategi program di lapangan.

Angka indeks P4GN pendekatan dimensi kebijakan lebih tinggi nilai indeksnya dibandingkan indeks P4GN keseluruhan. Peningkatan angka indeks terjadi pada semua dimensi kebijakan, tetapi paling signifikan pada hard approach dibanding dimensi lainnya. Kedeputian pemberantasan memberikan kontribusi terbesar untuk angka indeks P4GN di dimensi hard power approach.

Dari total 173 kabupaten/ kota sebagian besar memiliki angka indeks P4GN cukup efektif yaitu 67% (2021) dan 83% (2022). Angka indeks kabupaten/ kota dengan klasifikasi efektif sebanyak 2,3% (2021) dan 7,5% (2022). Ini mengindikasikan peningkatan kondisi angka indeks P4GN di kab/kota. Hal ini tidak terlepas dari upaya dan strategi inovasi yang dilakukan oleh daerah seperti integrasi kegiatan P4GN dengan kegiatan lain, sinergitas kegiatan P4GN dengan lintas sektor, pengembangan kegiatan P4GN dari sumber dana non DIPA/ dana hibah, dan beberapa kegiatan inovasi lainnya.

Dari keseluruhan angka indeks P4GN dari tahun 2020, 2021, dan 2022 terlihat tidak mengalami peningkatan yang signifikan bahkan cenderung tetap (stagnan). Situasi pandemi covid 19 menjadi salah satu faktor penyebab pelaksanaan kegiatan P4GN tidak bisa dilaksanakan secara maksimal baik di

tingkat pusat, provinsi ataupun kabupaten/ kota. Berbagai hambatan lain yang juga ditemukan adalah dukungan pemerintah daerah belum maksimal dengan alasan bahwa permasalahan narkoba bukan menjadi prioritas daerah, dan masih ada anggapan bahwa permasalahan narkoba menjadi tupoksi BNN. Hampir di Sebagian besar kabupaten/ kota belum banyak regulasi/ kebijakan daerah sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan P4GN sehingga OPD atau lintas sektor lain tidak berani melakukan kegiatan P4GN.

Hambatan internal BNNP/ BNNK dalam pencapaian kinerja adalah masih terbatasnya SDM, anggaran, sarana prasarana, luas wilayah (geografis), dan pencatatan/ pelaporan. Output kegiatan masih banyak yang belum terdokumentasikan dengan baik yang disebabkan karena kuantitas dan kualitas petugas input data belum memadai, dan juga aplikasi SIN yang masih harus dibenahi (sistem jaringan dan template atau kelengkapan form isian kegiatan).

Rekomendasi

- Sistem pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi SIN menjadi prioritas yang harus segera dibenahi mengingat masih banyak output kegiatan yang belum terdokumentasi dengan baik dan benar dalam rangka menunjang dan mendapatkan data indikator yang tertera dalam renstra dan kebutuhan data tiap kedeputian.
- Peningkatan pemahaman petugas data input SIN sehingga tidak ada kesalahan input kegiatan sesuai dengan output yang diharapkan atau memperkuat masing-masing satker untuk melakukan pemasukan data sendiri karena mereka yang lebih memahami kegiatan/program.
- Penyepakatan dan penyempurnaan template data atau kelengkapan form isian kegiatan pada SIN secara berkala dari tiap kedeputian/satker sehingga semua output kegiatan bisa diinput pada aplikasi SIN. Sehigga aplikasi yang ada di tiap satker dapat diintegrasikan ke SIN agar tercipta satu data di lingkungan BNN (misalnya E-Mindik pada satker pemberantasan).
- Peningkatan sinergitas antar deputi/ satker ataupun juga antar OPD atau lintas sektor sampai pada tingkat kabupaten/ kota sebagai implementasi

Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 tentang kewajiban pemerintah daerah melaksanakan kegiatan P4GN.

- Peningkatan kapasitas dan inovasi program bagi penggiat P4GN yang diprakarsai oleh satker dayamas dan pencegahan dengan berbagai program berkelanjutan, terutama dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang saat ini.
- Pemberian penghargaan/ reward kepada kader penggiat P4GN di daerah sebagai stimulus untuk meningkatkan prestasi dan strategi inovasi P4GN.
- Memberikan reward kepada BNN Provinsi dan BNN kab/kota yang melaporkan data secara tepat waktu dan kualitas data yang baik.
- Penyepakatan konsep, variabel, dan indikator yang akan dijadikan indeks P4GN ke depannya dan semua kebutuhan data tersebut dituangkan dalam SIN sehingga dapat dihasilkan data indeks P4GN secara rutin dan terstandar setiap tahunnya.

Kata Pengantar

Kajian Indeks P4GN disusun sebagai alternatif ukuran keberhasilan kinerja P4GN. Kajian Pengembangan indeks sebelumnya di tahun 2020 telah dilakukan dengan tahapan pengembangan konsep dan definisi variabel dan indikator pembentuk Indeks P4GN dilakukan pengumpulan data rutin dan diskusi kelompok terarah dengan seluruh bidang tugas di BNN pusat, dan Kementerian Lembaga terkait.

Selanjutnya pada tahun 2022 ini dilakukan kajian Indeks P4GN untuk meningkatkan dan menyempurnakan komponen penyusun indeks P4GN yang lebih mengutamakan penggunaan data dalam Sistim Informasi BNN dan data dari semua Bidang di BNN.

Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian Kajian Penyusunan Indeks P4GN. Semoga laporan akhir ini dapat menjadi kontribusi positif dan memberikan manfaat dalam alternatif perbaikan dan penyempurnaan program dan kebijakan P4GN di masa mendatang.

Kami berharap kajian ini dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan upaya penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba di di Indonesia dengan keberhasilan yang mampu terukur secara akurat, diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan rakyat seluruh wilayah Indonesia.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF 4

KATA PENGANTAR 19

DAFTAR TABEL 21

DAFTAR GRAFIK 21

DAFTAR SINGKATAN 22

BAB 1. PENDAHULUAN 26

A. Latar belakang 27

B. Tujuan 29

BAB 2. KERANGKA KONSEP DAN STRUKTUR BNN 30

A. Kerangka Konsep 31

B. Struktur dan Tupoksi BNN 35

BAB 3. DATA DAN METODE 39

A. Desain 38

B. Lokasi dan Waktu 39

C. Cara Penghitungan indeks P4GN 39

D. Tahapan kegiatan 41

E. Rencana Analisis 42

F. Keterbatasan 43

BAB 4. INDEKS P4GN NASIONAL 46

A. Angka Indeks P4GN Keseluruhan (Nasional) 46

B. Angka Indeks P4GN Pendekatan Kebijakan 48

BAB 5. INDEKS P4GN DAERAH 51

A. Angka Indeks P4GN Keseluruhan tingkat nasional, Provinsi, dan Kab/kota 52

B. Angka Indeks P4GN tingkat Provinsi 53
C. Angka Indeks P4GN di tingkat Kab/Kota 57
BAB 6. TANTANGAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA P4GN 63
A. Tantangan 64
B. Strategi 65
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN 68
A. Kesimpulan 68
B. Rekomendasi 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi, Batasan Indeks, dan Pengertian Klasifikasi dari Indeks P4GN 41

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Kecenderungan Angka Indeks P4GN Nasional Keseluruhan dan Pendekatan Kebijakan, 2020-2022 47

Grafik 2. Indeks P4GN dengan Pendekatan Kebijakan menurut Dimensi di Tingkat Nasional, Tahun 2021 & 2022 48

Grafik 3. Indeks P4GN dengan Pendekatan Kebijakan di Tingkat Nasional, Tahun 2021 & 2022 49

Grafik 4. Indeks P4GN dengan Pendekatan Kedeputian di Tingkat Nasional, Tahun 2021 & 2022 50

Grafik 5. Indeks P4GN Keseluruhan dan dengan Pendekatan Kebijakan pada Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Tahun 2021 dan 2022 53

Grafik 6. Indeks P4GN Keseluruhan menurut Dimensi di Tingkat BNN Provinsi, 2021 & 2022 54

Grafik 7. Indeks P4GN dengan Pendekatan Kebijakan menurut Dimensi di Provinsi, Tahun 2021 & 2022 55

Grafik 8. Indeks P4GN menurut Kedeputian di Tingkat BNN Provinsi, 2021 & 2022 55

Grafik 9. Indeks P4GN Keseluruhan di Tingkat Provinsi menurut Status Efektifitas, 2021 dan 2022 56

Grafik 10. Indeks P4GN dengan Pendekatan Keseluruhan menurut Provinsi, Tahun 2021 dan 2022 57

Grafik 11. Indeks P4GN Keseluruhan menurut dimensi di tingkat BNN Kabupaten/Kota, 20201dan 2022 58

Grafik 12. Indeks P4GN dengan Pendekatan Kebijakan menurut Dimensi di Kabupaten/Kota, Tahun 2021 dan 2022 59

Grafik 13. Indeks P4GN menurut Kedeputian di Tingkat BNN Kabupaten/Kota, Tahun 2021 dan 2022 60

Grafik 14. Indeks P4GN Keseluruhan di Tingkat Kabupaten/Kota menurut Status Efektifitas, Tahun 2021 dan 2022 60

Grafik 15. Indeks P4GN Keseluruhan pada 7 BNNK Tertinggi dan Terendah, Tahun 2022 61

DAFTAR GRAFIK

AP : Agen Pemulihan

BNN : Badan Narkotika Nasional

BNNK : Badan Narkotika Nasional – Kota/Kabupaten

BNNP : Badan Narkotika Nasional – Provinsi

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

E-Mindik : Elektronik-Administrasi Penyidikan Badan Narkotika Nasional

FGD : Focus Group Discussion

Hukker : Hukum dan Kerjasama

IBM : Intervensi Berbasis Masyarakat

IPWL : Institusi Penerima Wajib Lapor

IT : Informasi dan Teknologi

MOU : Memorandum of Understanding

OPD : Organisasi Perangkat Daerah

PKS : Perjanjian Kerja Sama

PPKM : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

PSBB : Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

P4GN : Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Satker : Satuan Kerja

SDM : Sumber Daya Manusia

Sestama : Sekretariat Utama

SIN : Sistem Informasi Narkoba

SIRENA : Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba

SKHPN : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba

TOT : Training of Trainers

Tupoksi : Tugas, Pokok dan Fungsi

BAB I
PENDAHULUAN

I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan pelaksanaan program P4GN

Penanganan permasalahan narkoba dalam struktur perencanaan pembangunan nasional disebut dengan Program P4GN. Sebagai program prioritas pembangunan manusia, keberhasilan program P4GN harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pertanggungjawaban kepada publik terkait kinerja program P4GN memerlukan adanya indikator sebagai ukuran capaian intervensi program untuk menggambarkan perkembangan atau perubahan kondisi yang dihasilkan.

Selama ini keberhasilan program P4GN hanya diukur dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba menurut masih terbatas padamenggambarkan kondisi keterpaparan penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia dan kurun waktu tertentu. Potret yang diberikan terkait dengan angka prevalensi adalah gambaran dampak (impact) program P4GN yang baru dapat terukur dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Histori pengukuran Indeks P4GN

Sementara pengukuran keberhasilan program atau kebijakan bukan hanya membutuhkan indikator yang bersifat jangka panjang, tetapi juga membutuhkan indikator yang dapat diukur perubahannya setiap tahun dan dilakukan secara rutin. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tidak memberikan gambaran atau mengidentifikasi faktor dan hubungan atau pengaruh secara langsung dari berbagai intervensi program P4GN terhadap perubahan suatu kondisi secara langsung. Untuk itu, BNN perlu membangun alternatif pengukuran keberhasilan P4GN selain dari angka prevalensi.

Pengukuran ini menggunakan instrumen pengukuran kinerja program P4GN berdasarkan landasan teori dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga dapat memotret, meninjau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program P4GN secara tepat.

Alternatif pengukuran yang telah dilakukan di tahun 2020 adalah pengukuran Indeks P4GN. Saat tahun 2020, pelaksanaan penyusunan indeks P4GN ini digagas oleh Badan Narkotika Nasional yang merupakan leading sector dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Dalam kegiatan ini BNN bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS).

Kajian di tahun 2020 menghasilkan angka indeks P4GN nasional yaitu 53,14% artinya masuk ke dalam kategori cukup efektif atau dengan kata lain kinerja BNN tahun 2019 dalam kegiatan P4GN cukup efektif, dari 100 kejadian P4GN, BNN mampu menyelesaikan sekitar 53 kejadian atau 53 persennya. Hasil perhitungan indeks P4GN di tingkat provinsi menghasilkan 55,9% dari total provinsi memiliki nilai Indeks P4GN di atas 40 atau masuk kategori cukup efektif dan sebanyak 44,1% provinsi sisanya memiliki indeks P4GN di bawah 40 atau masuk kategori kurang efektif. Sayangnya hasil kajian tersebut belum bisa secara langsung mengukur kepada indeks kinerja program di tingkat kedeputian. Padahal informasi tersebut diperlukan untuk bisa menjawab intervensi apa yang harus dilakukan di masing-masing kedeputian.

Mengapa perlu kajian ini

Untuk itu, pada tahun 2022 ini dilakukan penghitungan kembali penyusunan indeks P4GN agar dapat memenuhi kebutuhan dari tiap kedeputian. Atas dasar itu laporan ini dibuat dengan menggunakan data dasar dari SIN (Sistim Informasi Narkoba) milik BNN. Dengan berbagai pendekatan dan juga modifikasi metode perhitungan yang dilakukan sebelumnya di tahun 2020 disesuaikan dengan konteks program.

Indeks P4GN yang dikaji kali ini akan menggambarkan kinerja program untuk merefleksikan hasil kerja dari tiap kedeputian di BNN yang secara langsung

memberikan layanan pada masyarakat serta Bidang/Unit yang memberikan dukungan/menunjang kegiatan peningkatan Kapasitas dan operasional internal rutin di BNN.

B. Tujuan

Tujuan

Tujuan kajian penyusunan Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah:

1. Menyusun rumusan perhitungan indeks komposit P4GN dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan keseluruhan (input, proses, layanan/ouput) dan pendekatan kebijakan (soft approach, hard approach dan smart approach).
2. Mengetahui nilai indeks P4GN pada berbagai tingkatan, yaitu pusat, provinsi, dan kab/kota.

Manfaat

Manfaat kajian penyusunan Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah:

1. Memberikan kontribusi dalam pengukuran keberhasilan pelaksanaan program P4GN di Indonesia.
2. Memberikan rekomendasi dalam bentuk pemetaan hasil capaian program dan kegiatan P4GN sebagai bahan evaluasi guna perbaikan atau penyempurnaan kebijakan program dan kegiatan P4GN menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Memperoleh dokumentasi hasil penilaian kinerja P4GN dari tiap Deputi di BNN dan Indeks P4GN secara keseluruhan

BAB II
KERANGKA KONSEP DAN STRUKTUR BNN

II

KERANGKA KONSEP DAN STRUKTUR BNN

A. Kerangka Konsep

Konsep Pengukuran indeks P4GN

Konsep Indeks P4GN merujuk Kebijakan Terbaru di BNN berdasarkan arahan Kepala BNN yang kemudian disosialisasikan dalam berbagai kegiatan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BNN. Pendekatan strategi P4GN dengan konsep Pendekatan yang dikenal sebagai Pendekatan "Power" atau "Countermeasures" berikut yaitu Hard Power (Represive Countermeasures), Soft Power (Preventive Countermeasures) dan Smart Power (Preemptive Countermeasures).

1. Hard Power (Represive Countermeasures): kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang Anda lakukan (apakah mereka mau atau tidak), sering kali melalui ancaman atau penolakan, misal kekuatan militer atau paksaan ekonomi
2. Soft Power (Preventive Countermeasures): kemampuan untuk membuat orang lain benar-benar menginginkan apa yang Anda inginkan, misal Budaya, politik, kebijakan luar negeri
3. Smart Power (Preemptive Countermeasures): penggunaan strategis dan keseimbangan sumber daya hard dan soft power

Pendekatan kebijakan yang sedang diimplementasikan oleh BNN tersebut dijelaskan dalam gambar berikut

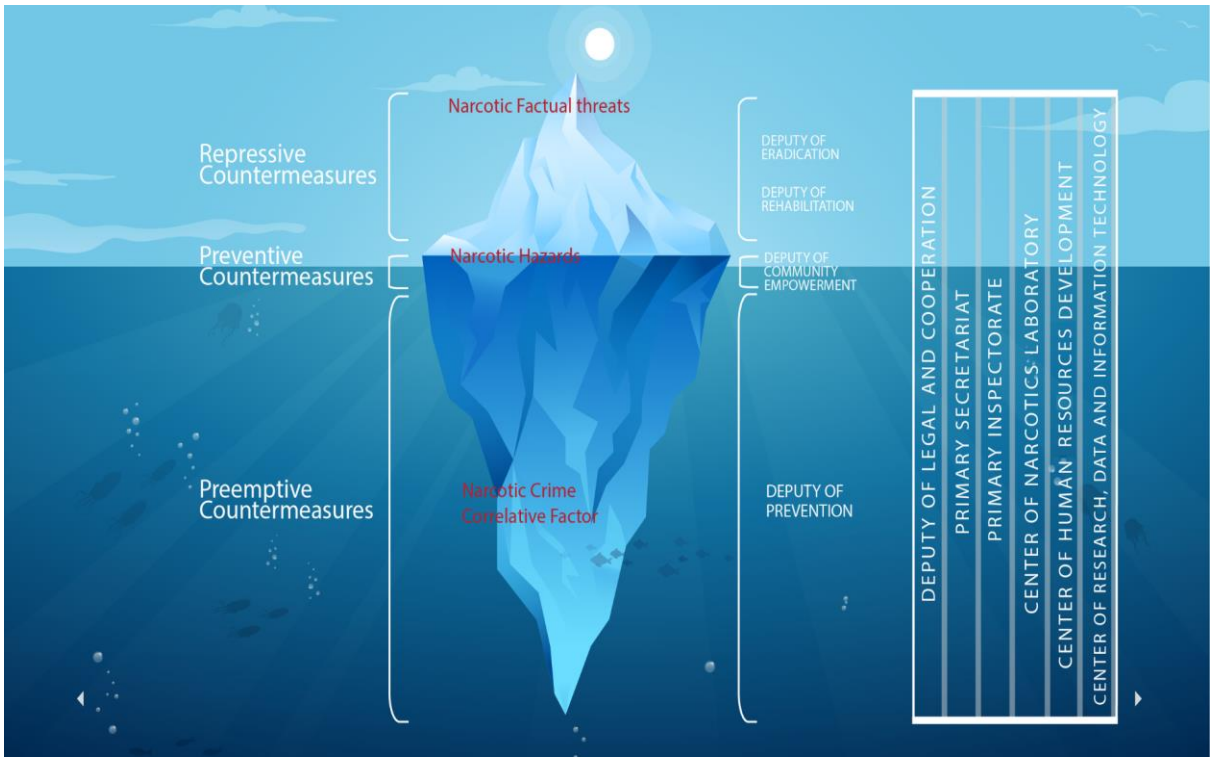

Sumber: "Diplomacy in Frame of Implemetation War on Drug" (Kapuslidatin BNN, 2022)

Dari gambar diatas dapat dilihat fokus *"approach"* bagi tiap Kedeputian di BNN. Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Deputi Pencegahan merupakan bagian dari strategi soft power approach, sementara Deputi Bidang pemberantasan dan Deputi Rehabilitasi merupakan strategi hard power approach, dan Puslitdatin sebagai strategi smart power approach. Pada pengembangannya, terdapat pula strategi cooperation, yaitu menjalin kerja sama tidak hanya nasional dan regional, namun BNN RI juga menjalin kerja sama internasional dengan negara-negara lain yang merupakan produsen narkoba guna mewaspadai peredaran narkoba berbagai jenis di Indonesia.

Angka indeks P4GN yang dimaksud dalam kajian ini adalah:

1. Angka atau skor ukuran atau indikator tidak langsung kinerja dan efektivitas program P4GN
2. Evaluasi dan akuntabilitas P4GN
3. Pengukuran seobyektif mungkin berdasar data [relevan dan akurat] pada struktur, proses, capaian, dan dampak program

4. Indeks kinerja fokus pada struktur, proses, dan layanan
5. Indeks efektivitas fokus pada capaian dan dampak
6. Perhitungan Indeks: Nasional dan Provinsi – Kabupaten/ Kota tergantung ketersediaan data

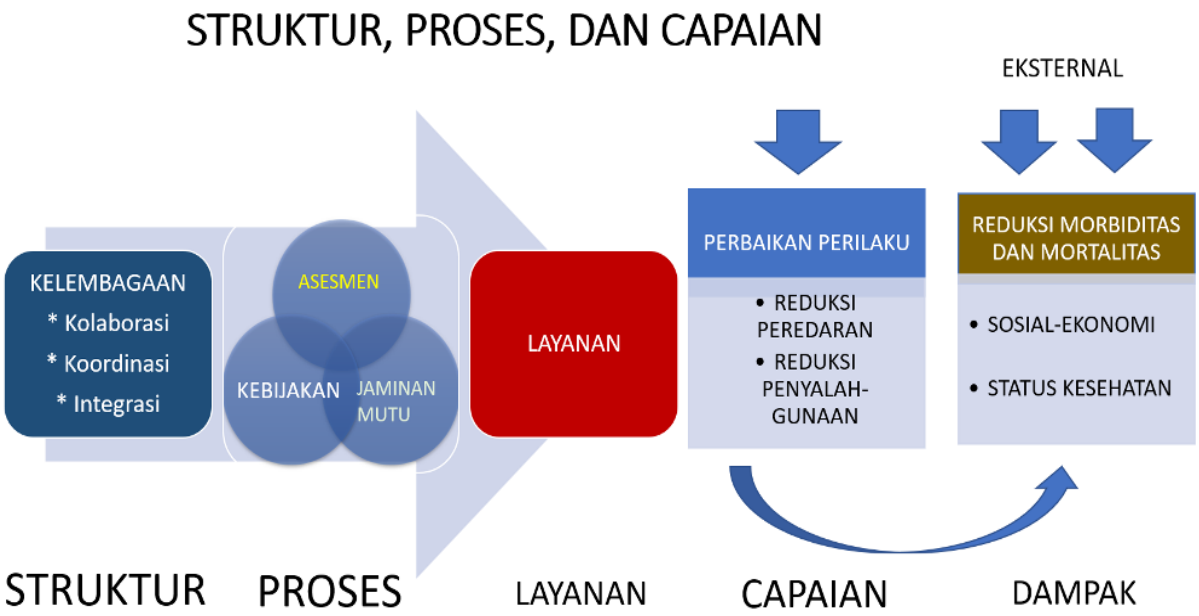

Konvergensi Pengukuran Indeks P4GN

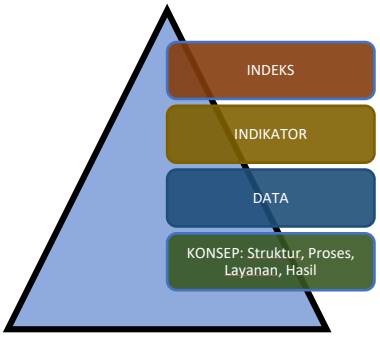

Tujuan
Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas
Indikator Tujuan
Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba
Indeks Pelayanan Publik
Sasaran Strategis
Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
Terwujudnya Manajemen Organisasi, Profesional Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi
Indikator Sasaran Strategis
Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Indeks P4GN)
Indeks Reformasi Birokrasi
Program
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis
Pemberantasan
Pencegahan
Pemberdayaan Masyarakat
Rehabilitasi
Hukum dan Kerjasama
Sekretariat Utama
Inspektorat Utama
Indikator Program
Jumlah Jaringan Sindikat diungkap
% penyelesaian TPPU Aset tersangka TP Narkotika
Indeks Ketahanan Masyarakat
Jumlah Kab/Kota Berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"
Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan
% Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami peningkatan Kualitas Hidup
Indeks Layanan Hukum P4GN
% Efektifitas Kerjasama Nasional & Internasional
Nilai Akuntabilitas Kinerja
Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN
Indeks kepuasan penyelenggaraan organisasi
Opini Laporan Keuangn
Jumlah Satker yang ditetapkan menuju WBK/WBBM
Nilai IACM
BNNP
Indeks P4GN Provinsi
BNNK
Indeks P4GN Kab/Kota

B. Struktur dan Tupoksi BNN

Peraturan BNN RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional menjabarkan BNN memiliki tugas dan fungsi tertentu yang telah diatur negara. Tugas dan fungsi BNN ini diembankan kepada inspektorat utama, sekretariat utama, 5 bidang kedeputian, 3 pusat-pusat dan akan diteruskan kepada BNN provinsi dan kota kabupaten yang menyebar di Indonesia.

Tugas-tugas utama BNN adalah: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika; i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain itu, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Sejalan dengan melaksanakan tugasnya, BNN juga menyelenggarakan fungsi sebagai: a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional; b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN; c. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN; d. penyusunan dan

perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN; e. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama; f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; g. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN; i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat; j. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; k. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi; l. pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu di tingkat pusat dan daerah; m. pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu oleh pemerintah maupun masyarakat; n. peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya; o. pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN; p. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN; q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN; r. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN; s. pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN; t. pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN; u. pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; v. pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

BAB III
DATA DAN METODE

III

DATA DAN METODE

A. Desain

Kajian penyusunan indeks P4GN menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan melakukan pengisian data mandiri dengan menggunakan instrumen terstruktur yang diisi secara online dengan menggunakan google form. Kegiatan survei ini dilaksanakan selama 3 minggu pada bulan Mei dan Juni 2022.

Pengisian angket survei ini ditujukan kepada seluruh tingkatan BNN, baik di tingkat pusat, BNN provinsi, dan BNN kab/kota. Di tingkat pusat, melibatkan semua bidang / kedeputian di BNN RI maupun di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, yang meliputi Deputi Bidang Pemberantasan, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Rehabilitasi, Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama, dan, Biro SDM dan Organisasi pada Sekretariat Utama dan Biro Umum.

Instrumen survei tersebut disusun dengan mengacu pada hasil analisis data sekunder dari sistem informasi nasional (SIN) yang dimiliki oleh BNN. SIN tersebut terhubung dan diisi datanya secara rutin oleh setiap satker di BNN, BNN provinsi, dan BNN kab/kota. Sayangnya, data yang terekam masih ada yang belum menjawab kebutuhan kajian ini dan adanya isu kualitas dan kelengkapan data. Atas dasar itu, dilakukan dan dilengkapi dengan survei online.

Pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara diskusi kelompok terpimpin (FGD) yang melibatkan BNN provinsi dan BNN kab/kota. Kegiatan ini dilakukan per tiap kedeputian yang dilaksanakan secara online selama 2 hari di bulan Juli 2022. Kegiatan FGD ini telah dilaksanakan sebanyak 5 kali. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi kegiatan/program per tiap kedeputian sehingga diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi dari hasil kajian kuantitatif.

Selain itu, tim penyusun indeks P4GN merupakan tim yang berasal dari perwakilan tiap kedeputian yang ada di BNN dan peneliti yang secara rutin bertemu dan berdiskusi atas berbagai temuan lapangan dan mencari solusi bila ada hambatan. Hasil diskusi dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini.

B. Lokasi dan Waktu

Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh institusi BNN, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kami tidak melakukan sampel agar dapat memotret fakta yang ada di seluruh institusi dilingkungan BNN. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Februari 2022 sampai Agustus 2022.

C. Cara Penghitungan indeks P4GN

Setelah data terkumpul, selanjutnya melakukan pengukuran dan pengolahan data. Cara penghitungan indeks P4GN sebagai berikut:

1. Menghitung bobot

    a) Data yang terkumpul disusun menurut kab/kota/provinsi/BNN, kedeputian, dimensi, variabel, dan indikator per tiap sheet dengan menggunakan sofware Microsoft Excel.

    b) Kami perlu memasukkan bobot, agar data yang dihitung per tiap kab/kota menjadi lebih adil. Untuk itu, digunakan variabel jumlah populasi penduduk di tiap kab/kota dan tiap provinsi.

    c) Untuk angka bobot jumlah populasi penduduk per kab/kota, diambil proporsinya. Dengan cara membagi jumlah penduduk per kab/kota dengan jumlah penduduk keseluruhan (misalkan angka kab/kota maka dibagi total penduduk di 173 kab/kota, karena jumlah BNN kab/kota ada 173 buah)

    d) Hasilnya dilakukan invers, dengan cara membagi angka 1 (satu) dengan proporsi penduduk per kab/kota dikalikan 1000. Hasil ini yang disebut angka bobot.

2. Mengalikan bobot (point 1) dengan jumlah kegiatan per tiap kegiatan menurut kategori input, proses, layanan/ouput pada tiap satker/kedeputian. Ataupun angka rasio atau proporsi, sangat tergantung dari indikator yang digunakan dari tiap dimensi ataupun variabel. Contoh angka rasio atau proporsi adalah jumlah orang yang tes positip narkoba dibagi jumlah orang tes narkoba.

3. Hasil perhitungan dari point 2 di atas, selanjutnya dicari nilai rentang tertinggi (nilai maksimal) dari seluruh kab/kota atau provinsi yang akan digunakan sebagai denominator untuk pembagi hasil point 2, di tiap kab/kota/provinsi. Angka ini merupakan nilai asli hasil akhir sebelum dilakukan normalisasi. Tujuan normalisasi adalah angka yang akan distandarkan nilainya dalam rentang tertentu, misalkan antara 0 sampai 1.

4. Bila telah diperoleh langkah 3 (nilai maksimal). Selanjutnya lakukan tindakan normalisasi angka yang diperoleh pada nilai point 2, dengan cara memasukan formula berikut: (nilai hasil - 0) / (nilai maksimal - 0).

5. Hasil perhitungan angka pada point 4. Selanjutnya dimasukan dalam formula :

Indeks P4GN = w_1 Indeks Input + w_2 Indeks Proses + w_3 Indeks Layanan

W_1 = 20%; W_2 = 30%; W_3= 50%;

w menunjukkan nilai bobot di tiap dimensi pengukuran yang disepakati oleh tim

6. Setelah diperoleh angka dari hasil perhitungan formula pada point 5. Langkah selanjutnya melakukan skoring, dengan formula sebagai berikut:

   (Nilai point 5 * 50) + 40

Sebagai catatan: Kami menyepakati memberikan nilai maksimal sebesar 90 per tiap indikator, dan nilai terendah adalah 40 per tiap indikator. Kesepakatan ini diputuskan setelah mempertimbangkan berbagai hal, terutama kualitas data yang masuk ke kami. Diduga karena ketidakjelasan dari pengisi data di lapangan, yang mengakibatkan kegagalan paham yang menyebabkan ketidaksesuaian data maka diputuskan bagi daerah yang tidak ada isinya atau tidak sesuai datanya diberikan nilai minimal sebesar 40. Jadi tidak dianggap kosong sama sekali.

7. Hasil angka indeks P4GN selanjutnya, dilakukan klasifikasi atau pengkategorian untuk memudahkan dalam memantau perkembangan tiap

kab/kota atau provinsi. Klasifikasi dibagi ke dalam 4 kategori seperti yang terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Klasifikasi, Batasan Indeks, dan Pengertian Klasifikasi dari Indeks P4GN

Klasifikasi	Batasan ukuran indeks	Pengertian klasifikasi
Sangat Efektif	Nilai indeks lebih dari 80	Hasil capaian kinerja sesuai batas nilai maksimal
Efektif	Nilai indeks antara 60 – 80	Hasil capaian kinerja sesuai batas nilai ideal
Cukup Efektif	Nilai indeks antara 50 – 60	Hasil capaian kinerja sesuai batas nilai standar minimal
Kurang Efektif	Nilai indeks kurang dari 50	Hasil capaian kinerja tidak mencapai nilai standar

D. Tahapan kegiatan

Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

Pertama, membangun persamaan dan pemahaman seluruh tim P4GN yang terlibat, karena tim yang terlibat berasal dari seluruh kedeputian yang ada di BNN dan tim peneliti yang berasal dari luar BNN. Untuk itu perlu disepakati kerangka konsep penyusunan indeks P4GN yang akan digunakan dan metodologinya. Informasi ini penting disepakati karena terkait tatacara yang akan dilakukan dan jenis data yang dikumpulkan untuk penyusunan indeks P4GN.

Hal yang menjadi catatan, ada perbedaan konsep yang disepakati antara tahun 2020 dengan saat ini. Di tahun 2020, konsep indeks P4GN dengan menggunakan pendekatan supply and demand reduction. Sedangkan saat ini adalah pendekatan input-proses-layanan/ouput (pendekatan keseluruhan) dan pendekatan kebijakan (hard, soft, smart, dan cooperation approach).

Kedua, melakukan review dan analisis data sekunder dari sistem informasi nasional (SIN) BNN. Seluruh data dan indikator yang ada di SIN dilakukan review dan dibahas oleh tim penyusun indeks P4GN. Ada kendala terkait kelengkapan dan kesesuaian data untuk penyusunan indeks, dan hal yang terpenting isu kualitas data.

Pada akhirnya disepakati untuk dilakukan pengumpulan data tambahan secara online melalui google form dengan merujuk dari hasil SIN. Selain itu, dilakukan pula FGD untuk menggali lebih mendalam temuan dari hasil studi kuantitatif.

Ketiga, melakukan penyusunan instrumen online dan FGD, serta melakukan pengumpulan datanya. Instrumen online disebarkan ke seluruh organisasi yang berada di bawah BNN, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kab/kota. Lama pengumpulan data online sekitar 3 sampai 4 minggu dan tim secara rutin mengingatkan bagi satker yang belum mengisi datanya.

Keempat, melakukan pengolahan dan analisis data. Proses ini dilakukan oleh tim peneliti dan hasilnya didiskusikan bersama tim penyusun indeks P4GN. Kami melakukan beberapa kali revisi terkait metode penghitungan yang dianggap paling sesuai dengan ketersediaan data yang ada.

Kelima, penysunan laporan dan presentasi. Kegiatan ini merupakan fase akhir, dimana setelah disepakati angka indeks P4GN yang dianggap final, maka dilakukan penyusunan draft laporan dan mempresentasikan hasilnya kepada tim BNN dan tim eksternal untuk diberikan umpan balik. Hasil umpan balik akan menjadi revisi laporan akhir kegiatan ini.

E. Analisis Data

Proses analisis data menggunakan software google form yang dilakukan pada saat pengumpulan data survei online, dimana data yang di-download dari google form telah berbentuk Microsoft Excel. Adapun pengolahan dan analisis data, digunakan Microsoft Excel. Fasilitas pivot tables pada Microsoft Excel banyak dimanfaatkan saat analisis data karena data yang ada dibentuk akan menjadi database agar lebih cepat dan mudah saat analisis data. Analisis data yang dilakukan berupa distribusi frekuensi dan tabulasi silang antar variabel.

Analisis data Indeks P4GN juga dilakukan dengan 2 jenis pendekatan, yang pertama pendekatan keseluruhan (sistem) yang terdiri dari dimensi input, proses, layanan/ouput; yang kedua pendekatan kebijakan yang terdiri dari dimensi hard, soft, smart, dan cooperation approach. Dalam hal ini. tidak melakukan uji statistik karena analisis yang dilakukan lebih kepada statistik deskriptif, dengan tujuan memberikan

gambaran dan distribusi hasil angka indeks P4GN di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota.

Untuk itu, kedua jenis angka indeks P4GN tersebut akan dilakukan tabulasi silang antar penyusun dimensi indeks, tingkatan (pusat, provinsi, kab/kota), klasifikasi indeks (sangat efektif, efektif, cukup efektif, dan kurang efektif), kedeputian (berantas, pencegahan, rehabilitasi, dayamas, hukker), dan sebagainya.

F. Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dari kajian ini yang mungkin akan mempengaruhi hasil dari kajian ini sebagai berikut:

1. Data dari sistem informasi nasional (BNN) masih banyak data yang diperlukan dalam renstra dan penyusunan indeks P4GN belum tersedia. Dari data yang ada, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah kelengkapan isian data, isu kualitas data karena ada data yang tidak konsisten dari pengisi datanya yang sepertinya tidak dipaham, data banyak tetapi tidak menjawab kebutuhan renstra. Dari berbagai permasalahan tersebut disepakati untuk melakukan survei online untuk melengkapi dan mengoreksi isian data sekunder tersebut.
2. Hasil isian survei online ada beberapa daerah yang isinya tidak sesuai dengan pertanyaannya. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktahuan petugas pengisi data, atau petugas tidak memiliki datanya sehingga asal mengisi. Isian angket ini tentu ada kelemahannya bila tidak diberikan sosialisasi tata cara pengisian secara khusus. Apalagi bila data yang diminta diisi cukup banyak dan harus membuka dokumen dengan rentang waktu yang lama, misalkan 2 tahun terakhir.
3. Isian data yang tertera dalam instrumen kami anggap telah sesuai dan benar, kecuali ada data yang sangat janggal dilakukan konfirmasi. Bila tidak dimungkinkan, maka dilakukan tindakan dengan cara melakukan inputasi data tidak lebih dari 5% dari total data. Dengan demikian, bila input data yang diberikan salah oleh petugas tentu akan berpengaruh atas hasil angka indeks yang dihasilkan dalam perhitungan ini.
4. Hasil kajian ini tidak mencerminkan angka kinerja yang sesungguhnya dari program P4GN. Hasil kajian ini menunjukkan peringkat pencapaian program P4GN antar daerah (rangking), serta dimensi yang mempengaruhinya. Tentunya,

dimensi penyusun indeks ini belum sempurna karena harus menyesuaikan dengan indikator atau data yang tersedia pada dimensi tersebut di tiap kedeputian. Setidaknya, hasil ini memberikan gambaran dan cambuk bagi kita untuk memperbaiki kinerja program P4GN ke depannya agar mampu bersaing dengan daerah lainnya.

BAB IV
INDEKS P4GN NASIONAL

IV

INDEKS P4GN NASIONAL

Angka indeks P4GN dapat diukur dengan 2 pendekatan, yaitu secara keseluruhan yaitu dengan pendekatan input, proses, dan layanan/output. Kedua, dengan pendekatan kebijakan yang sedang diimplementasikan oleh BNN yang dikenal dengan dimensi hard approach, soft approach, smart approach, dan cooperation approach.

A. Angka Indeks P4GN Keseluruhan (Nasional)

Penyusunan indeks P4GN telah dikembangkan sejak tahun 2020 dengan merujuk pada data 2019. Waktu itu, kegiatan ini pendekatan yang digunakan pendekatan supply dan demand. Namun, hasilnya dapat diperbandingkan dalam kajian ini karena bersifat nasional. Sebagai catatan, tim waktu itu tidak menghitung pada tingkat BNNK kab/kota, hanya provinsi dan nasional.

Dari grafik terlihat, angka indeks P4GN keseluruhan cenderung stabil dalam 3 tahun terakhir, di kisaran angka 53% sampai 55%. Hasil angka indeks dua tahun terakhir, kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan peningkatan kinerja tidak bisa optimal, tetapi BNN pusat dan BNN daerah masih mampu mempertahankan angka indeks P4GN. Pandemi Covid-19 dimulai sejak Maret 2020, dimana banyak kebijakan diluncurkan terkait dengan regulasi anggaran (refocusing) dan pelaksanaan kegiatan/program. Anggaran semua K/L dikurangi dan dialihkan untuk penanganan Covid-19, bahkan berlanjut sampai tahun 2021.

Grafik 1. Kecenderungan Angka Indeks P4GN Nasional Keseluruhan dan Pendekatan Kebijakan, 2020-2022

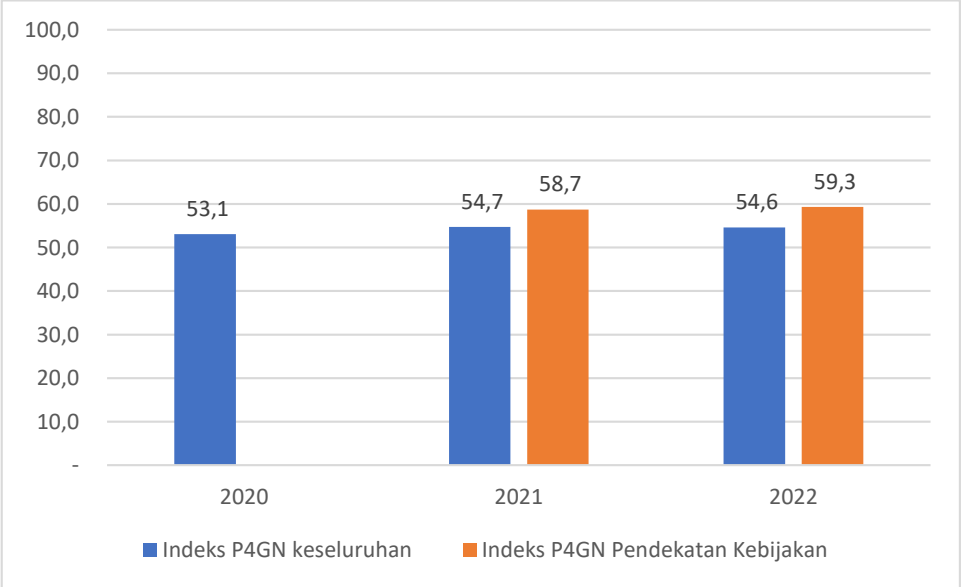

Selain dari sisi anggaran hal yang memberatkan dalam pelaksanaan program karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB), lalu diubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengakibatkan masyarakat tidak bisa beraktivitas, sehingga kegiatan/ program tidak bisa dijalankan, karena adanya sanksi bila melanggar regulasi tersebut. Akibatnya, kegiatan lebih banyak dilakukan secara online (daring), sehingga hasil capaian tidak optimal terutama kegiatan/program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Dengan berbagai tantangan tersebut, sepertinya BNN masih mampu untuk menyiasati dengan berbagai strategi kegiatan/program agar kinerja program BNN masih tetap bisa dipertahankan. Walau pun dengan berbagai keterbatasan, angka indeks P4GN secara keseluruhan masih bisa naik sedikit di tahun 2021 dan 2022.

Apabila ditelusuri lebih lanjut pada grafik di bawah ini, ada keseimbangan strategi kegiatan yang dilakukan pada dimensi input, proses, dan layanan (output). Kontribusi dari tiap dimensi relatif sama banyak, di kisaran 51% sampai 54% dalam dua tahun terakhir. Dimensi Input semakin diperkuat di tahun 2021, tetapi agak berkurang sedikit pada dimensi proses dan layanan. Kondisi ini yang memicu terjadinya angka indeks P4GN yang stagnan antara tahun 2021 dan 2022.

Grafik 2. Indeks P4GN dengan Pendekatan Kebijakan menurut Dimensi di Tingkat Nasional, Tahun 2021 & 2022

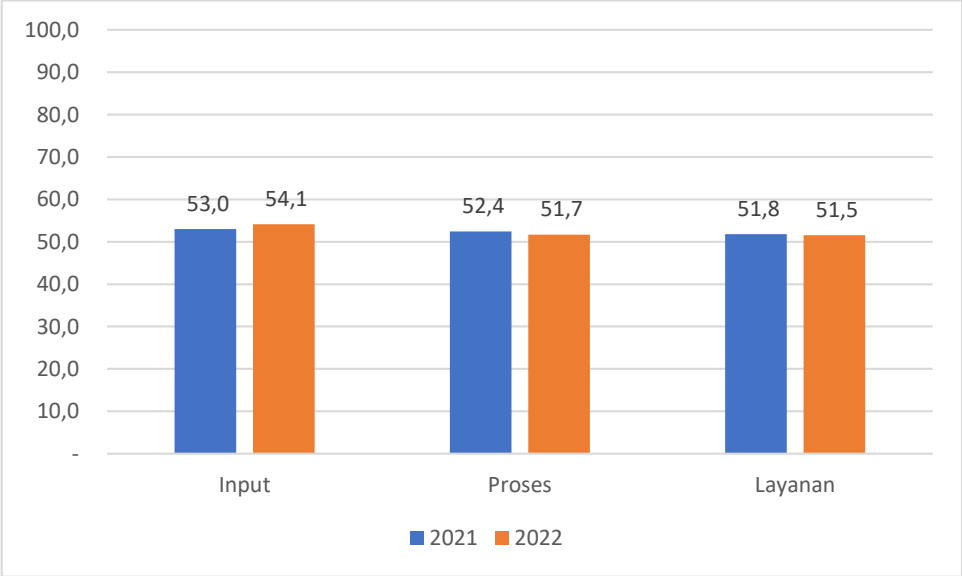

B. Angka Indeks P4GN Pendekatan Kebijakan

Angka indeks P4GN pendekatan kebijakan hasilnya lebih baik dibandingkan indeks P4GN keseluruhan. Angka indeks ini tidak dihitung dalam kegiatan kajian di tahun 2020. Ada 3 dimensi yang dijadikan sebagai ukuran, yaitu hard approach yang mencakup seluruh kegiatan/program yang terkait dengan kedeputian pemberantasan dan rehabilitasi. Soft approach mencakup seluruh kegiatan/program yang terkait dengan kedeputian pemberdayaan masyarakat dan pencegahan. Smart approach mencakup seluruh kegiatan/program yang terkait dengan kedeputian sestama dan pusat-pusat di lingkungan BNN, dan terakhir adalah cooperation approach mencakup seluruh kegiatan/program yang terkait dengan kedeputian hukum dan kerjasama.

Angka indeks pendekatan kebijakan mengindikasikan pendekatan yang paling berkontribusi untuk mengatasi persoalan P4GN. Secara nasional, temuan angka indeks ini lebih tinggi, yaitu 58,7% (2021) dan 59.3 (2022), dibandingkan angka indeks keseluruhan. Namun, kenaikan angka tersebut sangat kecil atau dapat dikatakan stabil di kisaran 59% dalam 2 tahun terakhir. Ini mengindikasikan persoalan P4GN semakin berat, apalagi situasi Pandemi Covid-19 yang belum usai, seperti di bulan Juli-Agustus 2022 adanya kecenderungan angka kenaikan kasus Covid-19.

Penelusuran angka per dimensi, memperlihatkan dimensi hard approach yang paling memberikan kontribusi terbesar, diikuti oleh smart approach. Bila dicermati, pencapaian hard dan smart approach dalam 2 tahun terakhir mengindikasikan kenaikan persentase, tetapi tidak untuk soft dan coorperation approach.

Kegiatan hard approach karena bersifat pemberantasan dan rehabilitasi sepertinya tidak terpengaruh oleh situasi pandemi, karena tidak memerlukan banyak orang untuk berkumpul. Demikian pula untuk smart approach lebih banyak kegiatan yang mendukung kelancaran semua program di lingkungan BNN. Namun, kegiatan yang terkait langsung ke masyarakat sepertinya terpengaruh, seperti pada soft approach.

Grafik 3. Indeks P4GN dengan Pendekatan Kebijakan di Tingkat Nasional, Tahun 2021 & 2022

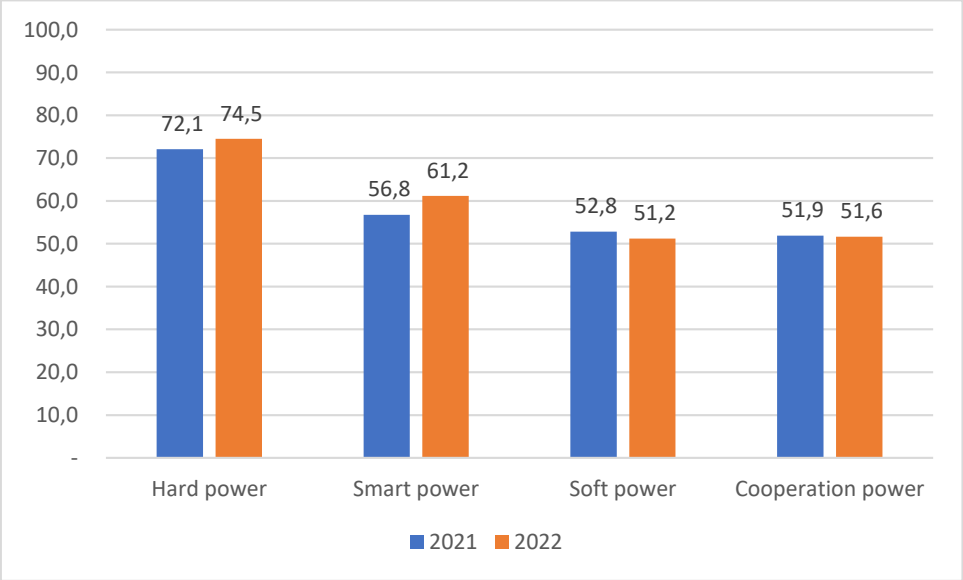

Bila dipilah lebih lanjut, kontribusi terbesar dari pendekatan hard power berasal dari kedeputian berantas. Kedeputian berantas memiliki angka indeks terbesar (70% & 71%) dibandingkan kedeputian lainnya (kurang dari 55%). Grafik di bawah ini menjelaskan kepada kita, mengapa capaian pada indeks P4GN pendekatan kebijakan berada di kisaran 51% sampai 62%, karena indeks per kedeputian sebagai penyusun indeks P4GN kebijakan juga berada di kisaran antara 48% sampai 53%, kecuali berantas.

Grafik 4. Indeks P4GN dengan Pendekatan Kedeputian di Tingkat Nasional, Tahun 2021 & 2022

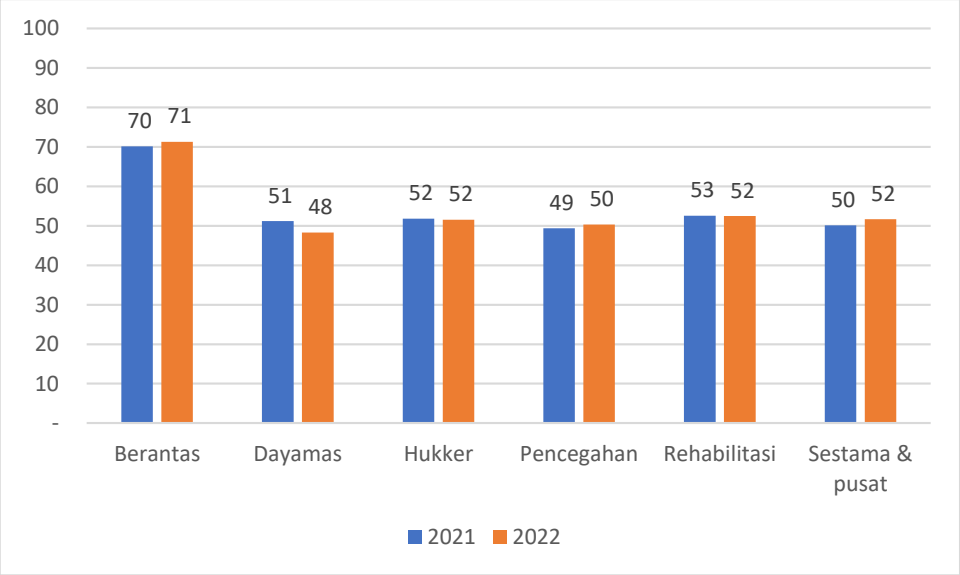

BAB V
INDEKS P4GN DAERAH

V

INDEKS P4GN DAERAH

A. Angka Indeks P4GN Keseluruhan tingkat nasional, Provinsi, dan Kab/kota

Grafik di bawah ini memperlihatkan angka indeks P4GN pada 2 pendekatan di berbagai tingkatan, yaitu nasional, provinsi, dan kab/kota. Angka indeks P4GN nasional disusun dari angka indeks di BNN kab/kota, BNN provinsi, dan BNN (pusat), sedangkan indeks provinsi disusun dari angka indeks tiap BNN kab/kota dan indeks BNNP.

Angka indeks P4GN nasional dengan pendekatan keseluruhan maupun pendekatan kebijakan berada di antara angka indeks P4GN provinsi dan angka indeks P4GN kab/kota. Angka indeks provinsi cenderung lebih tinggi dibandingkan angka indeks di kab/kota pada kedua pendekatan. Pada indeks P4GN keseluruhan, terlihat angka indeks P4GN provinsi cenderung stabil, di kisaran 56%, sementara indeks P4GN di kab/kota cenderung ada kenaikan, dari 51% ke 54%.

Hal ini mengindikasikan kinerja P4GN keseluruhan di tingkat BNN kab/kota lebih mampu mengatasi berbagai tantangan di tengah pandemi Covid-19. Hal ini mungkin karena BNN Kab/kota lebih implementor atau operasional sehingga lebih mengetahui kondisi di lapangan dalam mengimplementasikan dan mengatur strategi kegiatan/program. Sementara di BNN provinsi perannya lebih kepada koordinasi sehingga dalam implementasi relatif tidak banyak memberikan dampak yang terlalu signifikan terhadap kinerja indeks P4GN.

Grafik 5. Indeks P4GN Keseluruhan dan dengan Pendekatan Kebijakan pada Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Tahun 2021 dan 2022

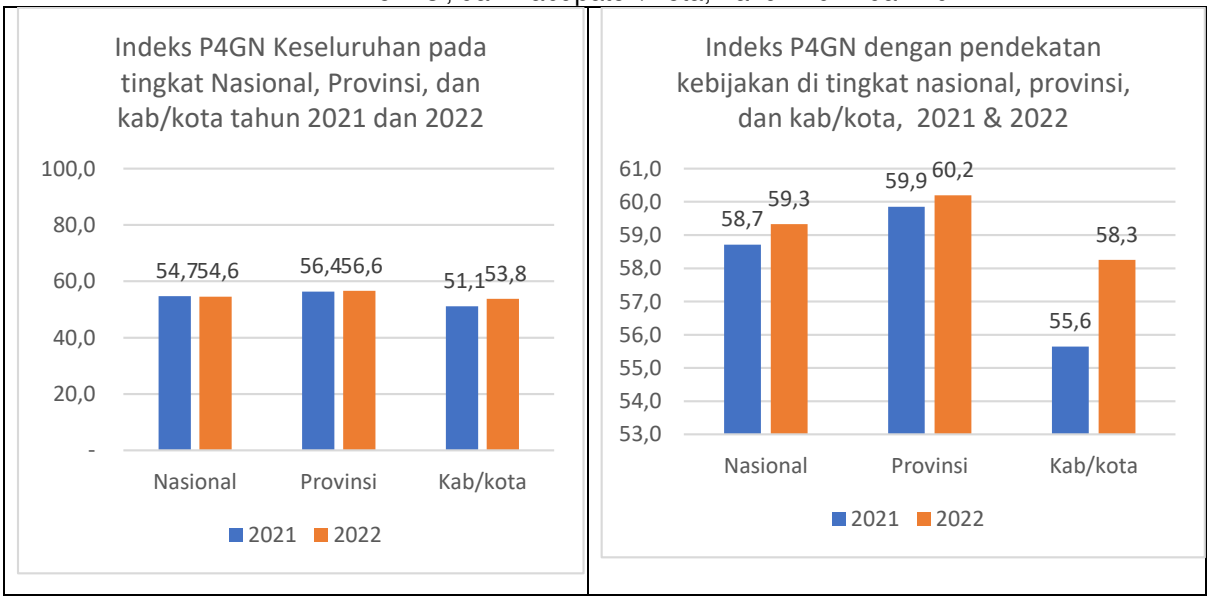

Pola yang sama terlihat pula pada indeks P4GN dengan pendekatan kebijakan. Indeks P4GN pendekatan kebijakan di tingkat kab/kota lebih terlihat perubahan hasilnya di tahun 2022. Sementara di provinsi, relatif tidak banyak berubah angka indeks P4GN-nya dalam 2 tahun terakhir.

B. Angka Indeks P4GN tingkat Provinsi

Angka indeks P4GN di tingkat provinsi dibangun dari angka indeks P4GN di tiap BNN provinsi dan tiap BNN kab/kota yang ada di provinsi tersebut. Angka ini merupakan angka rerata dari semua angka indeks yang dihasilkan di tiap BNNP dan BNNK.

Angka indeks P4GN keseluruhan di tingkat provinsi sebesar 56,4% (2021) dan 56,6% (2022). Ini mengindikasikan angka indeks di tingkat provinsi tidak berubah dalam 2 tahun terakhir. Bila ditelusuri lebih mendalam dari dimensi penyusun indeksnya, terlihat di antara ketiga dimensi proporsinya relatif sama besar antara input, proses, dan layanan/output, di kisaran 49% sampai 52%. Ada tren kenaikan, tetapi kenaikan tersebut tidak besar (tidak lebih dari 1%), kecuali di input. Kegiatan di input kebanyakan adalah rapat dan koordinasi, yang kontribusi bobotnya hanya 20% dalam penyusunan indeks P4GN.

Kontribusi kenaikan terbesar bila bisa melakukan peningkatan pada dimensi layanan, karena bobot indeks P4GN dari layanan mencapai 50%. Tantangannya, dimensi layanan kebanyakan bersifat langsung berinteraksi dengan masyarakat. Dengan situasi kondisi Covid-19 yang belum stabil, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan kinerjanya.

Grafik 6. Indeks P4GN Keseluruhan menurut Dimensi di Tingkat BNN Provinsi, 2021 & 2022

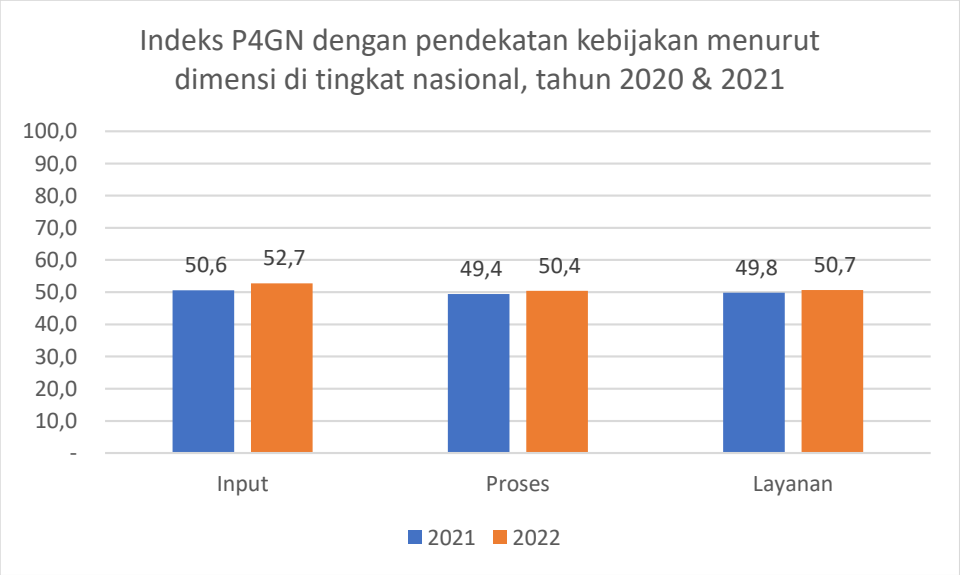

Angka indeks P4GN pendekatan kebijakan di tingkat provinsi sebesar 50.9% di tahun 2021 dan 60,2% di tahun 2022. Bila ditelaah lebih lanjut, kontribusi terbesar berasal dimensi hard approach. Sedangkan kontribusi terendah adalah soft approach. Hard approach memberikan kontribusi sekitar 60% di tahun 2021, lalu terus meningkat menjadi 65% tahun 2022. Ini mengindikasikan kegiatan hard approach semakin diperkuat di tingkat provinsi. Sementara pendekatan lainnya, relatif stagnan.

Di tingkat provinsi dan kab/kota tidak ada smart approach, karena kegiatan ini bersifat dukungan yang dilakukan oleh Sestama dan pusat-pusat yang ada di lingkungan BNN pusat. Secara praktek, mungkin ada di BNNP dan BNNK, tetapi kami tidak melakukan pengukuran secara khusus.

Grafik 7. Indeks P4GN dengan Pendekatan Kebijakan menurut Dimensi di Provinsi, Tahun 2021 & 2022

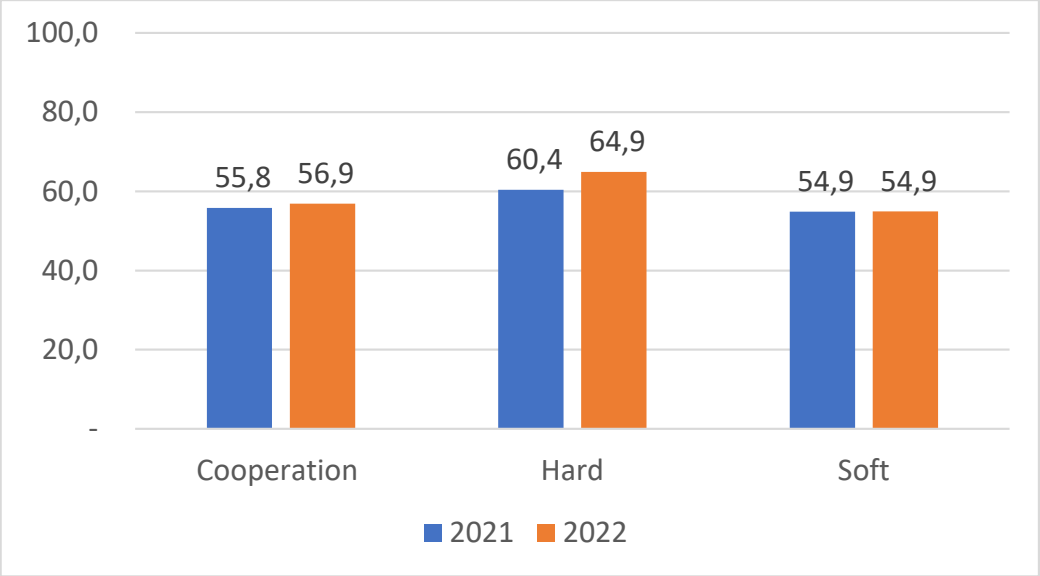

Penelusuran lanjutan untuk penyusun dimensi hard approach adalah kedeputian berantas dan rehabilitasi. Dari grafik di bawah ini, terlihat kedeputian berantas masih yang paling tertinggi dibandingkan kedeputian lainnya, 57% (2021) dan 59% (2022). Posisi kedeputian Dayamas dan pencegahan berada diatas sedikit dari rehabilitasi di tahun 2021. Sementara kedeputian hukker berada di tengah. Hal ini menjelaskan, temuan yang terjadi pada indeks P4GN pendekatan kebijakan, dimana urutan indeksnya adalah hard, cooperation, dan soft power.

Grafik 8. Indeks P4GN menurut Kedeputian di Tingkat BNN Provinsi, 2021 & 2022

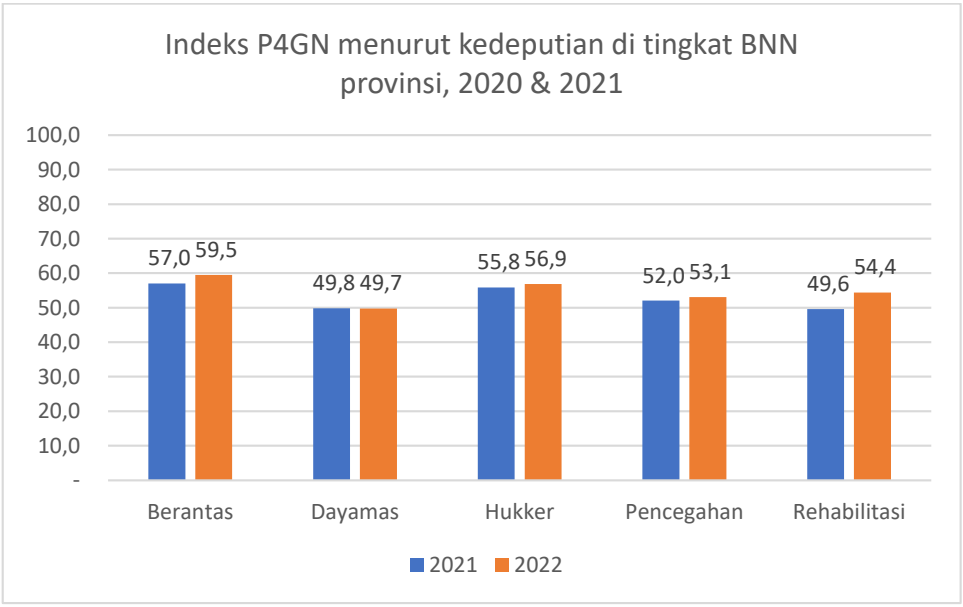

Untuk memudahkan dalam pemantauan perkembangan indeks P4GN, maka telah dibuat klasifikasi penilaian berdasarkan angka indeks dari tiap provinsi. Kami membagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu sangat efektif, efektif, cukup efektif, dan kurang efektif. Dari 4 kategori tersebut, hampir seluruh provinsi berklasifikasi cukup efektif di tahun 2021, dan seluruhnya di tahun 2022. Fakta ini mengindikasikan adanya penurunan status di 1 provinsi, dari efektif menjadi cukup efektif di tahun 2021 di provinsi Papua Barat. Nilai indeks P4GN melorot dari 64% menjadi 59,6%.

Grafik 9. Indeks P4GN Keseluruhan di Tingkat Provinsi menurut Status Efektifitas, 2021 dan 2022

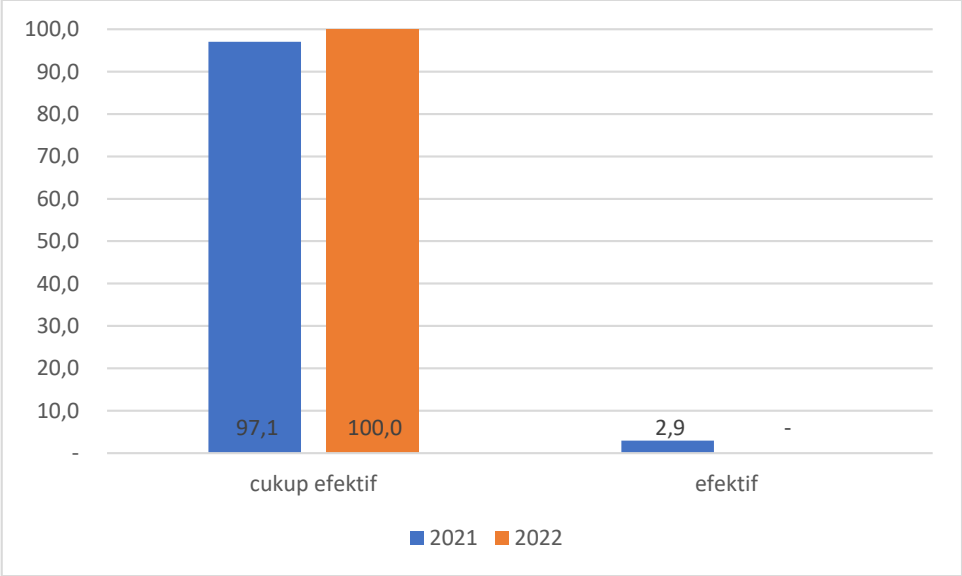

Angka indeks P4GN keseluruhan juga di rinci menurut provinsi. Grafik di bawah ini memperlihatkan urutan provinsi mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi di tahun 2022 (warna orange). Kita bisa melihat, ada provinsi yang angka indeks keseluruhannya turun, namun kebanyakan naik. Walaupun kenaikannya tidak besar. Angka indeks P4GN ini rentang antara nilai minimal dan maksimalnya tidak terlalu lebar (sekitar 8%). Ini mengindikasikan, tupoksi yang diterapkan antar provinsi tidak jauh berbeda. Sayangnya angka indeks P4GN yang dihasilkan masih jauh dari harapan kita semua.

Grafik 10. Indeks P4GN dengan Pendekatan Keseluruhan menurut Provinsi, Tahun 2021 dan 2022

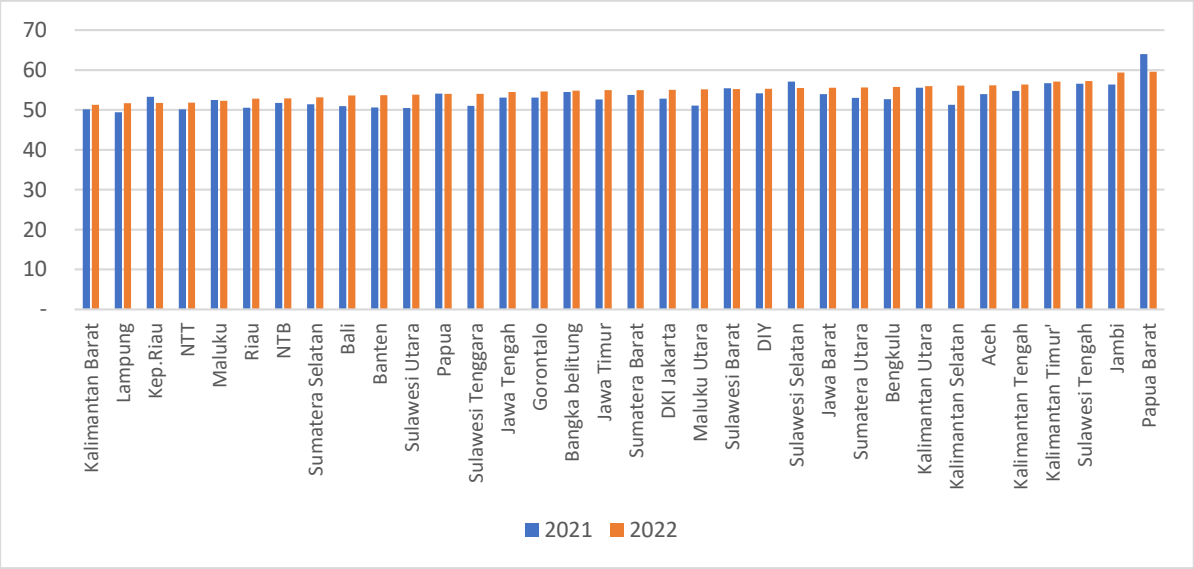

Angka indeks tertinggi di provinsi Papua Barat, baik tahun 2021 dan 2022. Namun, angka indeks ini mungkin tidak bisa disandingkan dengan provinsi lainnya karena di Papua Barat tidak ada BNN kab/kota, sehingga angka indeks yang dihasilnya hanya menggambarkan angka BNN provinsi, bukan gabungan angka BNN provinsi dan BNN kab/kota seperti di provinsi lainnya. Dari angka indeks P4GN yang dihasilkan di Papua Barat, terlihat cenderung menurun.

Pada Tahun 2022 angka indeks P4GN tertinggi di provinsi Jambi (59%). Angka ini meningkat dari sebelumnya sekitar 56% (2021). Sementara Indeks P4GN yang terendah ditemukan di provinsi Kalimantan Barat sekitar 51% (2022). Kalimantan Barat sebenarnya telah naik angka indeksnya dibandingkan tahun 2021, sebesar 50%, tetapi kenaikannya tidak sebesar provinsi lainnya. Sebagai informasi, indeks P4GN terendah di tahun 2021 adalah provinsi Lampung sekitar 49%, namun di tahun 2022 naik menjadi 52% menggeser posisi Kalimantan Barat menjadi yang terendah. Detail angka indeks P4GN secara lengkap dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

C. Angka Indeks P4GN di tingkat Kab/Kota

Jumlah total BNN Kab/kota ada sebanyak 173 kab/kota yang tersebar di 33 provinsi. Hanya satu provinsi, yaitu Papua Barat yang belum memiliki BNN kab/kota,

sehingga di provinsi ini tidak ada analisis yang terkait BNN kab/kota. Lihat penjelasan temuan provinsi Papua Barat di angka Indeks P4GN di tingkat Provinsi.

Angka indeks P4GN keseluruhan di kab/kota sekitar 51,1% di tahun 2021, lalu menjadi 53,8% tahun 2022. Apabila ditelusuri dimensi yang membangun indeks tersebut, ternyata angka capaiannya kurang dari 50% di tahun 2021 baik pada input, proses, dan layanan. Di tahun 2022 ada peningkatan sedikit pada semua dimensi, menjadi sekitar 50% sampai 51%. Dimensi input menjadi angka indeks kontributor terbesar dibandingkan dimensi lainnya. Meningkatkan capaian dimensi input sepertinya lebih mudah dibanding dimensi lainnya.

Grafik 11. Indeks P4GN Keseluruhan menurut dimensi di tingkat BNN Kabupaten/Kota, 2021 dan 2022

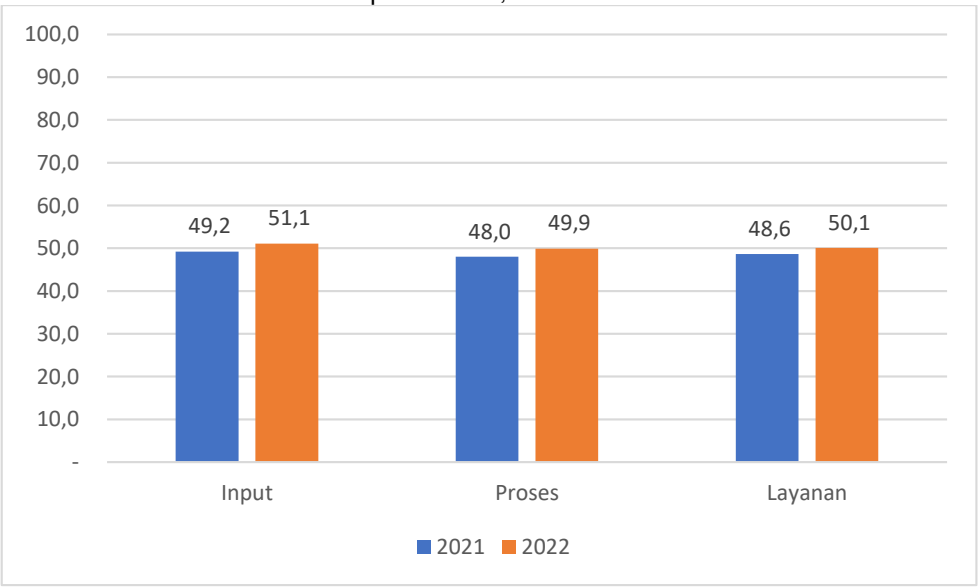

Angka indeks P4GN pendekatan kebijakan lebih tinggi nilai indeksnya dibandingkan indeks P4GN keseluruhan. Angka indeks P4GN pendekatan kebijakan sekitar 54% (2021), lalu meningkat menjadi 58% di tahun 2022. Bila ditelusuri, ternyata kontribusi terbesar karena adanya peningkatan angka indeks pada dimensi hard approach. Angka indeks hard approach meningkat besar dari 59% di tahun 2021 menjadi 64% di tahun 2022 atau naik sekitar 5%.

Indikator dimensi lainnya, terlihat ada peningkatan tetapi kenaikan hanya sekitar 2%, seperti pada cooperation approach dari 55% menjadi 57% atau soft approach dari 53% menjadi 54%. Hal ini mengindikasikan kegiatan hard approach semakin diperkuat di tingkat kab/kota. Tidak bisa dipungkiri, hard approach sepertinya

memberikan pengaruh yang kuat dalam upaya program P4GN. Ada 2 aspek yang menjadi perhatian serius dalam hard approach yaitu pemberantasan dan rehabilitasi.

Grafik 12. Indeks P4GN dengan Pendekatan Kebijakan menurut Dimensi di Kabupaten/Kota, Tahun 2021 dan 2022

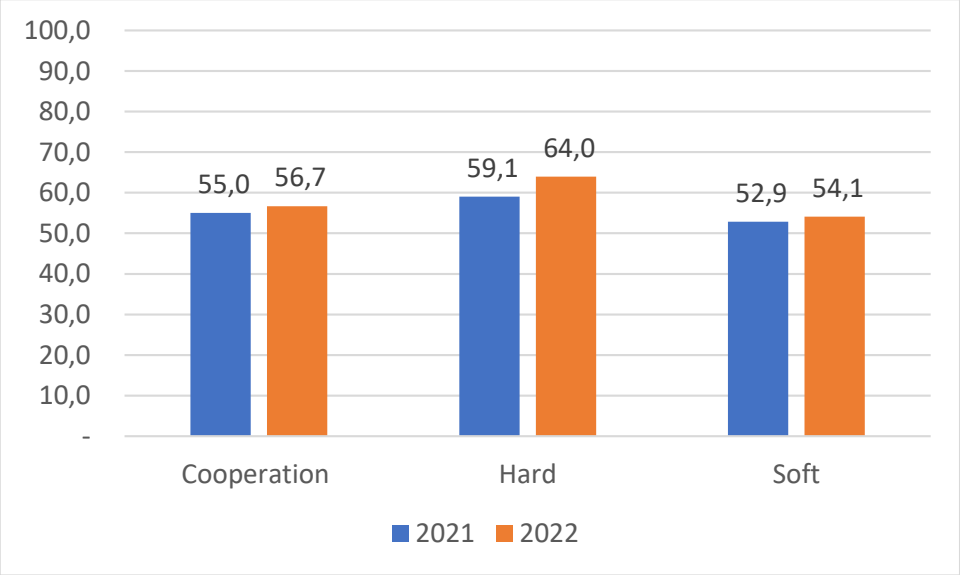

Hasil penelusuran lanjutan pada dimensi hard approach terlihat bahwa kedeputian berantas yang paling besar di tahun 2021 dan 2022. Namun, angka indeks di berantas sempat bersaing ketat dengan hukker di tahun 2021. Hal menarik perlu dicermati, kontribusi meningkatnya hard approach sepertinya karena kontribusi dari rehabilitasi. Indeks rehabilitasi meningkat besar, dari 47% (2021) menjadi 54% (2022). Bandingkan dengan berantas dari 55% (2021) menjadi 58% (2022).

Sementara kedeputian lainnya juga mengalami peningkatan angka indeks, tetapi kenaikannya tidak lebih dari 2%. Misalkan, dayamas dari 47% menjadi 49% atau Hukker dari 55% menjadi 57%. Mencermati angka indeks ini, sepertinya perlu strategi yang lebih jitu untuk mendorong kenaikan angka indeks yang lebih signifikan seperti yang dilakukan oleh kedeputian rehabilitasi ataupun berantas.

Grafik 13. Indeks P4GN menurut Kedeputian di Tingkat BNN Kabupaten/Kota, Tahun 2021 dan 2022

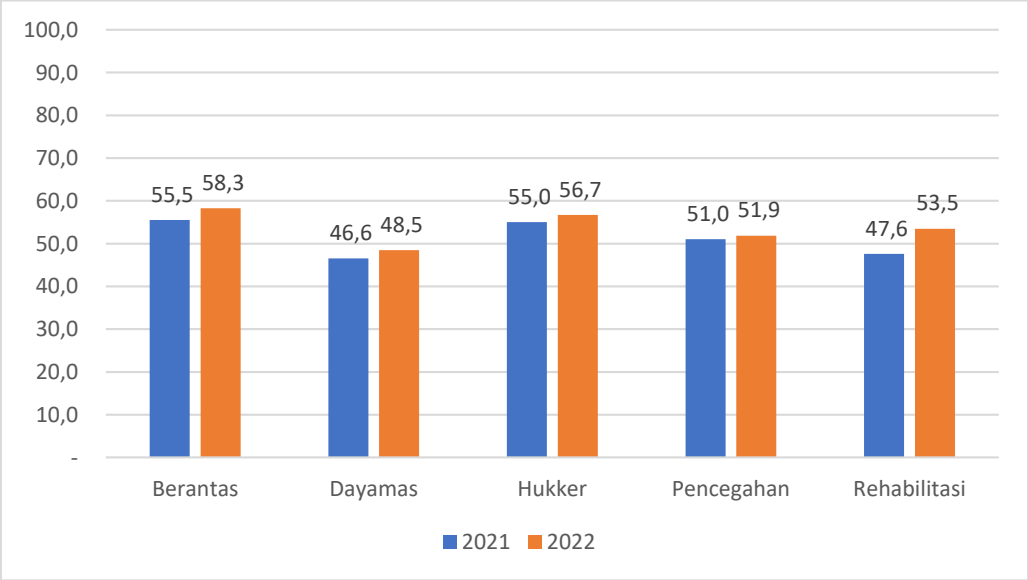

Mengingat jumlah kab/kota cukup besar, 173 kab/kota, maka untuk memudahkan dalam pemantauan kinerja maka dibuat klasifikasi angka indeks dibagi dalam 4 kategori, yaitu sangat efektif (lebih dari 80), efektif (60-80), cukup efektif (49-59), dan kurang efektif (kurang dari 49). Klasifikasi tersebut dengan memilah angka indeks P4GN yang dimiliki oleh setiap kab/kota.

Grafik 14. Indeks P4GN Keseluruhan di Tingkat Kabupaten/Kota menurut Status Efektifitas, Tahun 2021 dan 2022

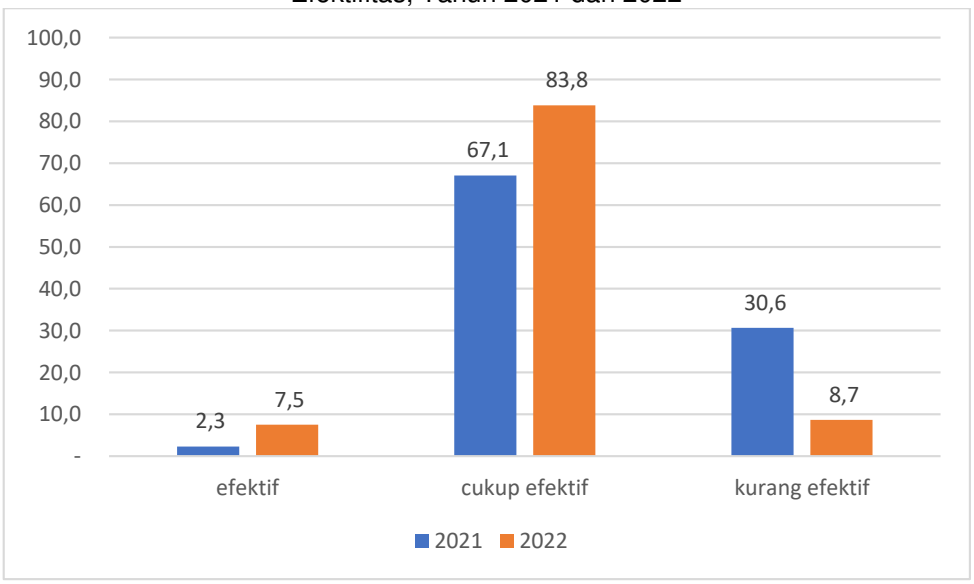

Dari grafik diketahui, sebagian besar kab/kota masuk dalam klasifikasi cukup efektif, baik di tahun 2021 dan 2022. Klasifikasi kab/kota yang cukup efektif semakin meningkat, dari 67% menjadi 84%. Artinya, ada sekitar 17% dari kab/kota yang telah naik kelas ke tingkat yang lebih baik. Indikasi ini dapat dilihat dari adanya

pengurangan proporsi kab/kota yang berkategori kurang efektif dari 31% menjadi 9%. Ini mengindikasikan adanya kenaikan kelas bagi kab/kota ke tingkat yang lebih tinggi. Kenaikan kelas klasifikasi juga terlihat pada klasifikasi efektif, dimana ada kenaikan dari 2% menjadi 8%. Dengan demikian dapat disimpulkan, status klasifikasi kab/kota semakin banyak yang membaik atau meningkat dari tahun 2021 ke 2022.

Grafik 15. Indeks P4GN Keseluruhan pada 7 BNNK Tertinggi dan Terendah, Tahun 2022

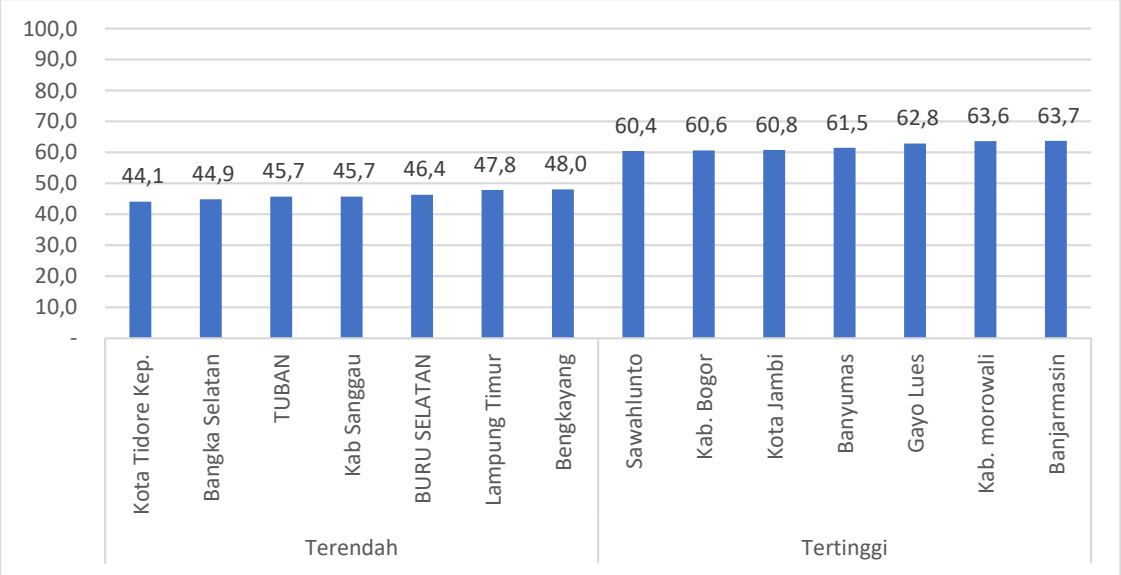

Dalam laporan ini juga telah disusun angka indeks per tiap kab/kota sebanyak 173 buah (detail dapat dilihat pada lampiran). Untuk memudahkan ilustrasi, telah diambil sampel 7 kab/kota tertinggi dan terendah di tahun 2022. Angka indeks P4GN keseluruhan di kab/kota terendah sebesar 44% (Kota Tidore Kepulauan), sedangkan yang tertinggi adalah Banjarmasin sebesar 64% dan hanya berbeda 0,1% dengan kab Morowali.

Kita bisa melihat pada grafik, bahwa rentang indeks antara kab/kota terendah dan tertinggi sekitar 20% yang terdistribusi untuk 173 kab/kota. Sehingga angka indeks antar satu kab/kota dengan kab/kota lainnya tidak akan jauh berbeda. Hal ini dapat dilihat dari urutan nilai dari 7 kab/kota dengan indeks tertinggi ataupun indeks terendah, nilai indeksnya hanya berbeda koma saja antar kab/kota. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa setiap BNN kab/kota harus terus berupaya keras mempertahankan nilai indeks setiap tahunnya, sebab adanya perbedaan sedikit nilai indeks akan bisa mempengaruhi peringkat antar kab/kota setiap tahunnya karena rentang nilai indeks yang sangat rendah.

BAB VI

TANTANGAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA P4GN

VI

TANTANGAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA P4GN

Dalam upaya pencapaian kinerja P4GN terlihat adanya berbagai tantangan yang dihadapi oleh BNN, BNNP, ataupun BNNK sehingga berbagai strategi inovasi dikembangkan di setiap daerah. Dalam studi ini, identifikasi terkait berbagai tantangan dan strategi diperoleh dari studi kualitatif melalui metode fokus group diskusi (FGD) dengan semua satker dari BNNP dan BNNK yang terpilih sebagai sampel.

Pada umumnya semua BNNP/ BNNK menyebutkan bahwa dalam 2 tahun terakhir capaian kinerja berbasis anggaran sudah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Dalam beberapa kegiatan terjadi pengembangan kegiatan melalui dana non DIPA, tetapi output kegiatan tidak dilaporkan dalam LKIP sebagai capaian kinerja. Pencatatan dan pelaporan kegiatan non DIPA hanya tercatat dalam monev dan anev. Pengembangan kegiatan non DIPA banyak dibiayai dari hasil kerjasama lintas sektor di berbagai daerah.

Tercapainya indeks kinerja berbasis anggaran tidak bisa disimpulkan sebagai keberhasilan BNNP/ BNNK dalam penanganan narkoba melalui kegiatan P4GN. Keterbatasan anggaran membatasi jenis dan jumlah kegiatan yang dilakukan, sedangkan permasalahan narkoba lebih komprehensif dengan berbagai indikator yang lebih luas. Angka indeks P4GN yang dimaksud dalam studi ini adalah capaian kinerja P4GN berbanding target dari total penduduk di semua kabupaten/ kota ataupun provinsi. Termasuk dalam hal ini adalah target seluruh wilayah terhadap status kemandirian, pemulihan daerah rawan ataupun alih fungsi dan alih profesi daerah rawan narkoba.

A. Tantangan

Tantangan pelaksanaan kegiatan dalam situasi pandemi covid 19 menyebabkan berbagai kegiatan tidak bisa dilaksankan secara maksimal terkait kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PSBB dan PPKM) dan refocusing anggaran. Peran daerah juga belum maksimal dalam mendukung kegiatan P4GN karena menganggap permasalahan narkoba tidak menjadi prioritas daerah tetapi menjadi tupoksi BNN. Payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan lintas sektor di daerah adalah regulasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait, tetapi pada kenyataannya masih banyak daerah yang belum mempunyai regulasi yang dimaksud. Demikian juga dengan MoU atau penandatanganan kerja sama (PKS) antara BNNP/BNNK dengan OPD atau lintas sector seringkali terkendala oleh keterlambatan Deputi Hukker dalam mereview dan menindaklanjuti MoU tersebut di tingkat pusat.

Pada saat ini belum semua kota/ kabupaten terbentuk BNNK sehingga masih banyak permasalahan narkoba yang belum mendapat penanganan secara maksimal. Pada Sebagian besar BNNK yang sudah terbentukpun masih banyak keterbatasan terkait SDM, sarana prasarana, anggaran, dan kesulitan akses geografis.

Pelaksanaan kegiatan oleh berbagai satker masih banyak terjadi kendala di berbagai wilayah, misalnya satker Dayamas dan pencegahan yang terkendala pelaksanaan kegiatan tes narkoba karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Kegiatan bimtek dan pelatihan kader/ penggerak kegiatan P4GN juga tidak bisa dilakukan secara langsung (offline). Pada satker rehabilitasi juga masih banyak terkendala keterbatasan tenaga kesehatan (terutama dokter) di klinik atau fasyankes, banyak klien IPWL drop out dengan alasan jauhnya akses layanan ataupun karena stigma negatif sebagai pelaku kriminal. Dalam pencatatan dan pelaporan, klien IPWL yang tidak mempunyai identitas juga tidak bisa dimasukkan ke dalam target capaian untuk di input ke dalam SIRENA karena akan menjadi temuan Irwas, meskipun realisasi layanan IPWL banyak ditemukan klien yang tidak mempunyai identitas. Target realisasi SKHPN (surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba) masih terkendala biaya cukup mahal sehingga masyarakat belum banyak mengakses layanan.

Pada satker pemberantasan masih banyak kekurangan petugas penyidik, kurangnya anggaran penyidikan dan kegiatan intelijen dalam pengungkapan kasus. Saat ini petugas penyidik di satker pemberantasan lebih banyak berasal dari penyidik Polri yang jumlahnya sangat kurang karena terbentur dengan aturan tidak diperbolehkan untuk jabatan fungsional. Jumlah sel tahanan di tingkat BNNP pun masih sangat kurang sehingga banyak penanganan yang tidak maksimal.

Tantangan mendasar pada semua satker saat ini adalah terkait pencatatan dan pelaporan melalui Sistem Informasi Narkoba (SIN) karena keterbatasan jumlah SDM, sehingga petugas input data seringkali merangkap tugas lainnya. Di beberapa BNNK juga masih ditemukan petugas input data dengan status tenaga honorer (non ASN) sehingga dikhawatirkan bisa berhenti atau pindah dari tempat kerja setiap saat. Kualitas petugas input data SIN saat ini juga belum terstandarisasi karena kurangnya pelatihan yang diberikan.

Kualitas data kegiatan yang diinput ke dalam SIN masih banyak yang kurang valid karena petugas tidak paham terhadap kegiatan sehingga kesulitan pada saat menginput laporan ke dalam SIN. Selain itu, ada beberapa kegiatan pada masing-masing satker yang tidak bisa diinput ke dalam SIN karena form isian jenis kegiatan (template SIN) tidak tersedia. Permasalahan lain yang juga ditemukan adalah terkait jaringan sulit di beberapa wilayah tertentu sehingga mengalami kendala saat menginput data SIN.

B. Strategi

Strategi inovasi dikembangkan oleh beberapa BNNP/ BNNK sebagai upaya mengatasi tantangan yang ada. Keterbatasan anggaran karena refocusing disiasiati dengan melakukan integrasi kegiatan P4GN ke dalam kegiatan lainnya. Alokasi anggaran kegiatan seperti dana perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan sebagainya dialihkan untuk kegiatan bimtek. Metode online (daring) menjadi strategi efektif pelaksanaan kegiatan di masa pandemik covid 19. Sinergitas kegiatan P4GN kolaborasi dengan OPD dan lintas sektor juga banyak dikembangkan untuk mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan.

Advokasi anggaran kepada pimpinan daerah terus ditingkatkan dengan mengacu pada MoU dan regulasi pemerintah daerah. Beberapa upaya advokasi anggaran terlihat berhasil di beberapa daerah, seperti di Kalimantan Tengah yang

masih memperkuat Kerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan pemanfaat dana hibah atau APBD.

Dalam upaya deteksi dini dan penjaringan penyalahgunaan narkoba, BNNP/ BNNK bekerjasama dengan satpol PP untuk menjangkau komunitas anak jalanan. Demikian juga penjangkauan ke sekolah dengan melibatkan Puskesmas di wilayah setempat. Kerjasama dengan universitas setempat terus ditingkatkan guna memperoleh data evidence base sebagai dasar penentuan kebijakan/ program.

Salah satu kegiatan inovasi untuk meningkatkan cakupan IPWL dengan kegiatan rehabilitasi melalui remaja desa dengan metode jemput bola (mendatangi target sasaran) sampai ke tingkat desa dengan dukungan sarana transportasi dari pemerintah daerah dan juga penggunaan kapal milik TNI AL untuk menjangkau daerah kepulauan. Pemberian dana hibah oleh Pemda juga terlihat untuk kegiatan pemberantasan dalam bentuk razia-razia yang tidak dialokasikan dari DIPA. Keterbatasan petugas penyidik pada satker pemberantasan dalam pemberkasan dan pengungkapan kasus disiasati dengan strategi pendampingan oleh penasehat hukum kepada petugas.

Peningkatan akses layanan SKHPN menggunakan metode on line sehingga masyarakat dengan mudah melakukan konseling dan pendaftaran yang selanjutnya bisa mengakses melalui klinik pratama. Advokasi anggaran juga menekankan untuk kegiatan mengantar klien IPWL menuju tempat rehabilitasi sehingga kejadian drop out bisa diminimalisir.

Peran agen pemulihan (AP) dan kader penggerak kegiatan P4GN perlu dimaksimalkan sebagai strategi TOT kepada masyarakat melalui kegiatan intervensi berbasis masyarakat (IBM). Salah satu upaya yang dilakukan oleh satker dayamas dan pencegahan adalah dengan advokasi anggaran desa untuk pemberian honor kepada agen pemulihan dan kader penggerakan. Sinergitas dengan berbagai lembaga dilakukan untuk peningkatan skill terapi vokasional kepada para klien IBM.

BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Angka indeks P4GN dalam 3 tahun terakhir terlihat tidak jauh berbeda yaitu 53,1% (2020), 54,7% (2021), dan 54,6% (2022). Dasar penghitungan indeks pada tahun 2020 menggunakan pendekatan supply & demand reduction, sedangkan pada 2 tahun terakhir (2021 & 2022) dengan pendekatan input, proses, output/ layanan. Terlihat sedikit berbeda angka indeks P4GN dengan pendekatan dimensi kebijakan hard approach, soft approach, smart approach, dan cooperation approach, yaitu 58,7% (2021) dan 59,3% (2022).

Berdasarkan batasan skala indeks yang digunakan terlihat bahwa angka indeks P4GN pada ketiga tahun tersebut adalah cukup efektif, dalam pengertian capaian kinerja P4GN sudah sesuai dengan target yang ditetapkan meskipun dalam batas nilai standar minimal.

Angka indeks P4GN pendekatan kebijakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota cenderung mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir (2021 & 2022). Di tingkat nasional meningkat dari 58,7% menjadi 59,3%, tingkat provinsi dari 59,9% menjadi 60,2%, dan tingkat kabupaten/ kota dari 55,6% menjadi 58,3%.

Peningkatan angka indeks P4GN terlihat paling signifikan pada tingkat kabupaten/ kota dibanding tingkat nasional ataupun provinsi. Hal ini mengindikasikan kinerja P4GN keseluruhan di tingkat BNN kab/kota lebih mampu mengatasi berbagai tantangan di tengah pandemi Covid-19. Hal ini mungkin karena BNN Kab/kota lebih implementor atau operasional sehingga lebih mengetahui kondisi di lapangan dalam mengimplementasikan dan mengatur strategi kegiatan/program.

Jumlah total BNN Kab/kota ada sebanyak 173 kab/kota yang tersebar di 33 provinsi. Hanya provinsi Papua Barat yang belum memiliki BNN kab/kota, sehingga di provinsi ini tidak ada analisis yang terkait BNN kab/kota. Angka indeks P4GN keseluruhan di kab/kota sekitar 51,1% di tahun 2021, lalu menjadi 53,8% tahun 2022.

Angka indeks P4GN pendekatan dimensi kebijakan lebih tinggi nilai indeksnya dibandingkan indeks P4GN keseluruhan. Angka indeks P4GN pendekatan dimensi kebijakan sekitar 54% (2021), lalu meningkat menjadi 58% di tahun 2022. Peningkatan angka indeks terjadi pada semua dimensi kebijakan, tetapi paling signifikan pada hard approach dibanding dimensi lainnya.

Berbagai faktor penyebab tingginya angka indeks P4GN dimensi hard power approach adalah banyaknya kolaborasi dan kerjasama dengan faskes pemerintah ataupun swata sebagai instansi penerima wajib lapor (IPWL). Kebijakan ini memberikan efek terhadap peningkatan kesadaran masyarakat untuk lapor diri guna memperoleh rehabilitasi sehingga meningkatkan cakupan klien IPWL. Pada satker pemberantasan juga terlihart adanya dukungan pendanaan dari kementerian/ Lembaga kepada daerah untuk penguatan program pemberantasan dan juga program alih fungsi dan alih profesi.

Dari total 173 kabupaten/ kota terlihat sebagian besar memiliki angka indeks P4GN cukup efektif yaitu 67,1% (2021) dan 83,8% (2022). Angka indeks kabupaten/ kota dengan klasifikasi efektif sebanyak 2,3% (2021) dan 7,5% (2022). Dari kedua klasifikasi indeks tersebut terlihat terjadi peningkatan capaian angka indeks P4GN pada sekitar 17% kabupaten/ kota. Hal sebaliknya terjadi penurunan proporsi jumlah kabupaten/ kota dengan klasifikasi kurang efektif dari 30,6% (2021) menjadi 8,7% (2022).

Indikasi terjadinya peningkatan pada semua dimensi kebijakan tidak terlepas dari strategi inovasi di setiap daerah seperti integrasi kegiatan P4GN dengan kegiatan lain, sinergitas kegiatan P4GN dengan lintas sektor, pengembangan kegiatan P4GN dari sumber dana non DIPA/ dana hibah, dan beberapa kegiatan inovasi lainnya.

Dari keseluruhan angka indeks P4GN dari tahun 2020, 2021, dan 2022 terlihat tidak mengalami peningkatan yang signifikan bahkan cenderung tetap (stagnan). Situasi pandemi Covid 19 menjadi salah satu faktor penyebab pelaksanaan kegiatan P4GN tidak bisa dilaksanakan secara maksimal baik di tingkat pusat, provinsi ataupun kabupaten/ kota. Berbagai hambatan lain yang juga ditemukan adalah dukungan pemerintah daerah belum maksimal dengan alasan bahwa permasalahan narkoba bukan menjadi prioritas daerah, dan masih ada anggapan bahwa permasalahan narkoba menjadi tupoksi BNN. Hampir di Sebagian besar kabupaten/ kota belum

banyak regulasi/ kebijakan daerah sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan P4GN sehingga OPD atau lintas sektor lain tidak berani melakukan kegiatan P4GN.

Hambatan internal BNNP/ BNNK dalam pencapaian kinerja adalah masih terbatasnya SDM, anggaran, sarana prasarana, luas wilayah (geografis), dan pencatatan/ pelaporan. Output kegiatan masih banyak yang belum terdokumentasikan dengan baik yang disebabkan karena kuantitas dan kualitas petugas input data belum memadai, dan juga aplikasi SIN yang masih harus dibenahi (sistem jaringan dan template atau kelengkapan form isian kegiatan).

B. Rekomendasi

1) Sistem pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi SIN menjadi prioritas yang harus segera dibenahi mengingat masih banyak output kegiatan yang belum terdokumentasi dengan baik dan benar dalam rangka menunjang dan mendapatkan data indikator yang tertera dalam resntra dan kebutuhan data tiap kedeputian.
2) Peningkatan pemahaman petugas data input SIN sehingga tidak ada kesalahan input kegiatan sesuai dengan output yang diharapkan atau memperkuat masing-masing satker untuk melakukan pemasukan data sendiri karena mereka yang lebih memahami kegiatan/program.
3) Penyepakatan dan penyempurnaan template data atau kelengkapan form isian kegiatan pada SIN secara berkala dari tiap kedeputian/satker sehingga semua output kegiatan bisa diinput pada aplikasi SIN. Sehigga aplikasi yang ada di tiap satker dapat diintegrasikan ke SIN agar tercipta satu data di lingkungan BNN (misalnya E-Mindik pada satker pemberantasan).
4) Peningkatan sinergitas antar deputi/ satker ataupun juga antar OPD atau lintas sektor sampai pada tingkat kabupaten/ kota sebagai implementasi Intruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 tentang kewajiban pemerintah daerah melaksanakan kegiatan P4GN.
5) Peningkatan kapasitas dan inovasi program bagi penggiat P4GN yang diprakarsai oleh satker dayamas dan pencegahan dengan berbagai program berkelanjutan, terutama dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang saat ini.
6) Pemberian penghargaan/ reward kepada kader penggiat P4GN di daerah sebagai stimulus untuk meningkatkan prestasi dan strategi inovasi P4GN.

7) Memberikan reward kepada BNN Provinsi dan BNN kab/kota yang melaporkan data secara tepat waktu dan kualitas data yang baik.
8) Penyepakatan konsep, variabel, dan indikator yang akan dijadikan indeks P4GN ke depannya dan semua kebutuhan data tersebut dituangkan dalam SIN sehingga dapat dihasilkan data indeks P4GN secara rutin dan terstandar setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

BNN RI, Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN. 2020. Panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja.

BNN RI, Deputi Hukum dan Kerjasama, dan, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi; Unika Atma Jaya Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. 2020. Laporan Akhir Kajian Hukum tentang Sistem Peradilan Pidana Narkotika. Prioritas Nasional BNN.

BNN RI, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.

BNN RI, Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

BNN RI, Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

BNN RI, Surat Edaran No.SE/180/XI/KA/PM.00/2021/BNN tentang Kuesioner dan Penghitungan Indeks Kemandirian Partisipatif.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Pamartohadi, Drs. Etiko. Kabid Penanganan Kejahatan Transnasional, Asdep 3/V Deputi Kamtibmas Kemenko Polhukam. Peran Kementerian / Lembaga dalam Pelaksanaan Inpres 2 Tahun 2020. Powerpoint Presentation.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Angka Indeks P4GN Keseluruhan per Provinsi

Nama Provinsi	2021	2022
Aceh	53.9	56.1
Sumatera Utara	53.0	55.6
Sumatera Barat	53.8	55.0
Riau	50.5	52.8
Jambi	56.3	59.3
Sumatera Selatan	51.4	53.1
Bengkulu	52.7	55.7
Lampung	49.4	51.7
Bangka belitung	54.5	54.8
Kep.Riau	53.3	51.8
DKI Jakarta	52.8	55.0
Jawa Barat	54.0	55.5
Jawa Tengah	53.0	54.5
DIY	54.1	55.3
Jawa Timur	52.6	54.9
Banten	50.6	53.7
Bali	50.9	53.6
NTB	51.8	52.9
NTT	50.1	51.8
Kalimantan Barat	50.1	51.3
Kalimantan Tengah	54.8	56.4
Kalimantan Selatan	51.3	56.1
Kalimantan Timur	56.7	57.1
Kalimantan Utara	55.6	56.0
Sulawesi Utara	50.5	53.8
Sulawesi Tengah	56.6	57.2
Sulawesi Selatan	57.1	55.5
Sulawesi Tenggara	51.0	54.0
Gorontalo	53.1	54.6
Sulawesi Barat	55.4	55.2
Maluku	52.5	52.3
Maluku Utara	51.1	55.2
Papua Barat	64.0	59.6
Papua	54.1	54.0

Lampiran 2.

Angka Indeks P4GN keseluruhan tingkat BNN kab/kota

Average of Indeks_all		Tahun	
Provinsi	Kab/Kota	2021	2022
Aceh	Aceh Selatan	48.8	48.5
	Aceh Tamiang	54.6	56.8
	Banda Aceh	48.2	51.3
	Bireuen	59.6	58.2
	Gayo Lues	60.6	62.8
	Kabupaten Pidie	47.9	51.5
	Kota Langsa	51.5	55.1
	Lhokseumawe	54.2	55.9
	Pidie Jaya	47.3	51.7
	Sabang	48.6	52.9
Sumatera Utara	Asahan	52.3	53.7
	Kabupaten Batu Bara	52.4	60.2
	Kabupaten Deli Serdang	51.7	54.7
	Kabupaten Karo	54.8	56.6
	Kabupaten Labuhanbatu Utara	51.5	53.6
	Kota Binjai	53.5	55.7
	Kota Gunungsitoli	49.6	52.2
	Kota Pematangsiantar	51.2	58.4
	Kota Tanjungbalai	58.4	56.9
	Kota Tebing Tinggi	51.1	51.9
	Langkat	51.0	55.2

	Mandailing Natal	50.7	54.1
	Serdang Bedagai	51.9	54.1
	Simalungun	54.1	51.1
	Tapanuli Selatan	49.2	55.0
Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	54.6	55.5
	Pasaman Barat	51.5	54.9
	Sawahlunto	54.9	60.4
	Solok	49.6	50.3
Riau	Dumai	55.6	59.2
	Kuantan Singingi	46.5	54.2
	Pekanbaru	49.7	50.8
	Pelalawan	46.7	48.8
Jambi	Kabupaten Batang Hari	51.4	55.5
	Kota Jambi	56.2	60.8
	Tanjung Jabung Timur	51.1	51.0
Sumatera Selatan	Empat Lawang	49.8	49.3
	Kabupaten Musi Rawas	48.8	51.1
	Kabupaten Ogan Ilir	49.1	52.8
	Lubuklinggau	51.0	59.7
	Muara Enim	48.3	51.4
	Ogan Komering Ilir	48.1	50.0
	Ogan Komering Ulu Timur	48.2	49.1
	Pagar Alam	57.7	55.5
	Prabumulih	48.2	48.7

Bengkulu	Bengkulu	51.8	53.7
	Bengkulu Selatan	48.6	57.0
Lampung	Kabupaten Way Kanan	47.7	53.9
	Kota Metro	47.3	49.5
	Lampung Selatan	47.8	51.2
	Lampung Timur	45.8	47.8
	Tanggamus	48.7	52.4
Bangka belitung	Bangka Selatan	45.3	44.9
	BNN Kab. Belitung	49.3	55.6
	Kabupaten Bangka	52.5	60.4
	Pangkalpinang	55.9	54.0
Kep.Riau	Batam	46.9	50.0
	Karimun	48.8	49.3
	Tanjungpinang	49.6	49.7
DKI Jakarta	Jakarta Utara	51.6	55.0
	Kota Jakarta Selatan	54.0	58.6
	Kota Jakarta Timur	48.3	49.7
Jawa Barat	Bandung	59.3	57.4
	Bandung Barat	47.5	52.0
	BNN Kabupaten Garut	49.8	55.8
	Ciamis	52.7	53.6
	Cianjur	51.5	51.3
	Cimahi	54.2	54.6
	Depok	53.1	50.2

	Kabupaten Bogor	55.1	60.6
	Karawang	58.2	57.2
	Kota Cirebon	56.1	58.2
	Kuningan	49.1	50.1
	Sukabumi	51.1	57.6
	Sumedang	50.2	57.4
	Tasikmalaya	54.7	57.5
Jawa Tengah	Banyumas	56.2	61.5
	Batang	49.4	48.1
	Cilacap	49.9	51.0
	Kendal	52.1	56.3
	Kota Tegal	53.7	56.7
	Magelang	52.9	50.8
	Purbalingga	49.6	51.1
	Surakarta	55.4	60.4
	Temanggung	52.9	50.3
DIY	Bantul	51.0	53.1
	Sleman	50.6	50.4
	Yogyakarta	51.3	54.3
Jawa Timur	Blitar	47.9	52.2
	BNN Kabupaten Gresik	54.7	54.7
	BNN Kabupaten Kediri	50.2	52.5
	BNN Kota Mojokerto	52.0	53.4
	Kabuapten Lumajang	48.4	57.7

	Kabupaten Malang	50.9	54.1
	Kabupaten Trenggalek	49.9	52.4
	Kabupaten Tulungagung	52.0	52.9
	Kota Batu	54.2	59.8
	Kota Kediri	50.5	55.1
	Malang	51.2	57.7
	Nganjuk	48.0	48.7
	Pasuruan	52.0	56.3
	Sidoarjo	59.3	55.4
	Sumenep	59.9	56.8
	Surabaya	52.0	57.3
	Tuban	50.2	45.7
Banten	Kota Cilegon	48.3	51.3
	Kota Tangerang	51.2	58.3
	Tangerang Selatan	50.1	53.5
Bali	Badung	51.1	56.5
	Buleleng	48.8	51.4
	Denpasar	51.6	52.3
	Gianyar	50.9	53.0
	Kabupaten Karangasem	48.7	53.9
	Kabupaten Klungkung	48.1	51.3
NTB	Kabupaten Bima	50.3	50.7
	Kabupaten Sumbawa	48.4	48.3
	Kota Mataram	50.4	53.6

	Sumbawa Barat	49.5	53.4
NTT	Bnn Kab Belu	47.4	48.2
	Kota Kupang	48.5	49.1
	Rote Ndao	46.7	50.5
Kalimantan Barat	Bengkayang	46.1	48.0
	Kabupaten Kubu Raya	47.7	51.6
	Kabupaten Mempawah	46.6	48.6
	Kabupaten Sanggau	47.3	45.7
	Kabupaten Sintang	46.3	50.7
	Pontianak	50.4	56.8
	Singkawang	52.0	50.6
Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Barat	50.6	50.0
	Palangkaraya	51.9	57.0
Kalimantan Selatan	Balangan	51.8	51.7
	Banjarbaru	54.3	55.6
	Banjarmasin	52.9	63.7
	Barito Kuala	50.8	56.0
	Hulu Sungai Selatan	47.7	52.2
	Kabupaten Hulu Sungai Utara	50.1	56.6
	Kabupaten Tanah Laut	48.4	60.2
	tabalong	47.7	51.5
Kalimantan Timur'	Bontang	53.8	55.5
	Kota Balikpapan	55.3	56.1
	Samarinda	57.4	60.3

Kalimantan Utara	Kabupaten Nunukan	55.2	55.9
	Kota Tarakan	53.8	53.1
Sulawesi Utara	Bitung	48.0	52.3
	Bolaang Mongondow	49.8	57.5
	Kabupaten Kepulauan Sangihe	48.1	53.6
	Kota Manado	47.2	51.7
Sulawesi Tengah	bnnk Banggai Kepulauan	51.2	54.7
	Donggala	60.7	56.0
	Kabupaten morowali	60.6	63.6
	Kabupaten Tojo Una Una	54.2	58.6
	Kota Palu	54.5	60.2
	Poso	54.0	53.1
Sulawesi Selatan	Kab. Bone	55.2	53.3
	Kabupaten Tana Toraja	62.5	57.9
	Kota Palopo	54.4	55.9
Sulawesi Tenggara	Kabupaten Muna	48.3	51.0
	Kendari	46.3	54.3
	Kolaka	47.3	53.6
	Kota Baubau	46.9	53.1
Gorontalo	Boalemo	50.4	54.1
	Bone bolango	48.3	50.3
	Gorontalo	50.9	52.8
	Gorontalo Utara	48.5	49.4
	Kota Gorontalo	50.7	53.2

Sulawesi Barat	Polewali Mandar	52.2	52.6
Maluku	BURU SELATAN	43.2	46.4
	Kota Tual	49.4	51.8
Maluku Utara	Kab.Halmahera Utara	49.1	53.1
	Kota Tidore Kepulauan	44.4	44.1
	Pulau Morotai	49.2	54.5
Papua	Jayapura	51.6	51.3
	Mimika	50.1	54.2